

**DAMPAK BANTUAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TERHADAP KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN WOLOWARU
KEBUPATEN ENDE**



Oleh:

HAMDAN MOH LENGGO

NIM .4513 022 012

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hamdan Moh Lenggo
Nomor stambuk : 4513022012
Jurusan : Sosiologi
Program Studi : Ilmu Sosiologi
Judul : Dampak Bantuan Operasional (BOS) Terhadap
Keluarga Miskin Di Kecamatan Wolowaru
Kabupaten Ende

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian
Skripsi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universtas Bosowa Makassar

Makassar , 12 Desember 2018

Menyetujui ;

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr.Syamsul Bahri ,S.Sos. M. SI.


Dr,Muh Rusdi Maidin,S.H.M.SI

Mengetahui ;

DEKAN FAK. ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK

KETUA JURUSAN
ILMU SOSIOLOGI


Arief Wicaksono, S.ip,MA


Dr,HJ, Nurmi Nonci, M.SI

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Skripsi dengan Judul “Dampak Bantuan Dana Operasional (BOS) Terhadap Keluarga Miskin Di Kecamatan Wowloearu Kabupaten Ende”

Nama : **Hamdan Moh. Lenggo**

NomorStambuk : **45 13 022 012**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Program Studi : **Sosiologi**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Sosiologi.

Pengawas Umum:


Arief Wicaksono, S.Ip, M.A

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Panitia Ujian:


Dr. Syamsul Bahri, M.Si

Ketua

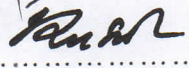

Dr. A. Muh. Rusdi Maidin, M.Si

Sekretaris

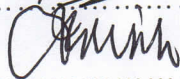
Tim Penguji:

1. Dr. Syamsul Bahri, M.Si
2. Dr A. Muh. Rusdi Maidin, M.Si
3. Dr. Hj. Nurmi Nonci, M.Si
4. Der. Hj. Asmirah, M.Si


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

KATA PENGANTAR

Dengan penuh sukacita, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, atas kasih setianya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan, bahkan sering terjadi pengorbanan dalam berbagai hal. Namun, penulis menyadari bahwa semua itu merupakan romantika dalam mengarungi dunia kampus yang serba kompleks.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr H.M. Salle Pallu. M.eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Arief Wicaksono,S.Ip,M.A Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
3. IBU Dr, HJ, Nurmi Nonci, M, SI. selaku ketua jurusan ilmu Sosiologi
4. Bapak Dr.Syamsul Bahri, S, Sos, M, SI Selaku pembibing 1 dan Bapak Dr, Muh, Rusdi Maidin, S.H. M. SI. Selaku pembibing 11. Yang telah petunjuk dan bimbingan penulisan penyusunan skripsi hingga selesai

5. Bapak dan Ibu Dosen Serta seluruh karyawan dalam lingkungan Universitas Bosowa 45 Makassar.

Makassar, 23 Maret 2018

Peneliti



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	3
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Teori structural Fungsional	8
B. Tinjauan Tentang dana Bos (Bantuan operasional sekolah).....	9
C. Tinjauan tentang Pendidikan.....	12
D. Tinjauan tentang kemiskinan	15
E. Kerangka konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	26
C. Teknik pengumpulan data	27

D. Teknik analisis data.....	28
------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil sekolah.....	31
B. Tinjauan Sekolah.....	32
C. Prestasi Lulusan.....	33
D. Pengembangan dan Kompetensi Guru dan tTenangga pendidikan.	33
E. Pengemnbangan Kurikulum.....	34
F. Serana dan Praserana.....	34
G. Pengembangan Nilai	35
H. Program bantuan Operasional Sekolah	35
I. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah	36
J. Waktu Penyaluran Dana.....	37
K. Jenis Biaya Pendidikan.....	37
L. Program BOS dan Wajib belajar 6 tahun bermutu.....	40
M. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.....	41
N. Tanggung jawab peserta didik, orang tua peserta didik	42

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
B. Sumber Daya Manusia	51
C. Dana	52
D. Pencapaian Proses (Procces).....	55
E. Mutuh Pendidikan	57
F. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan BOS	59

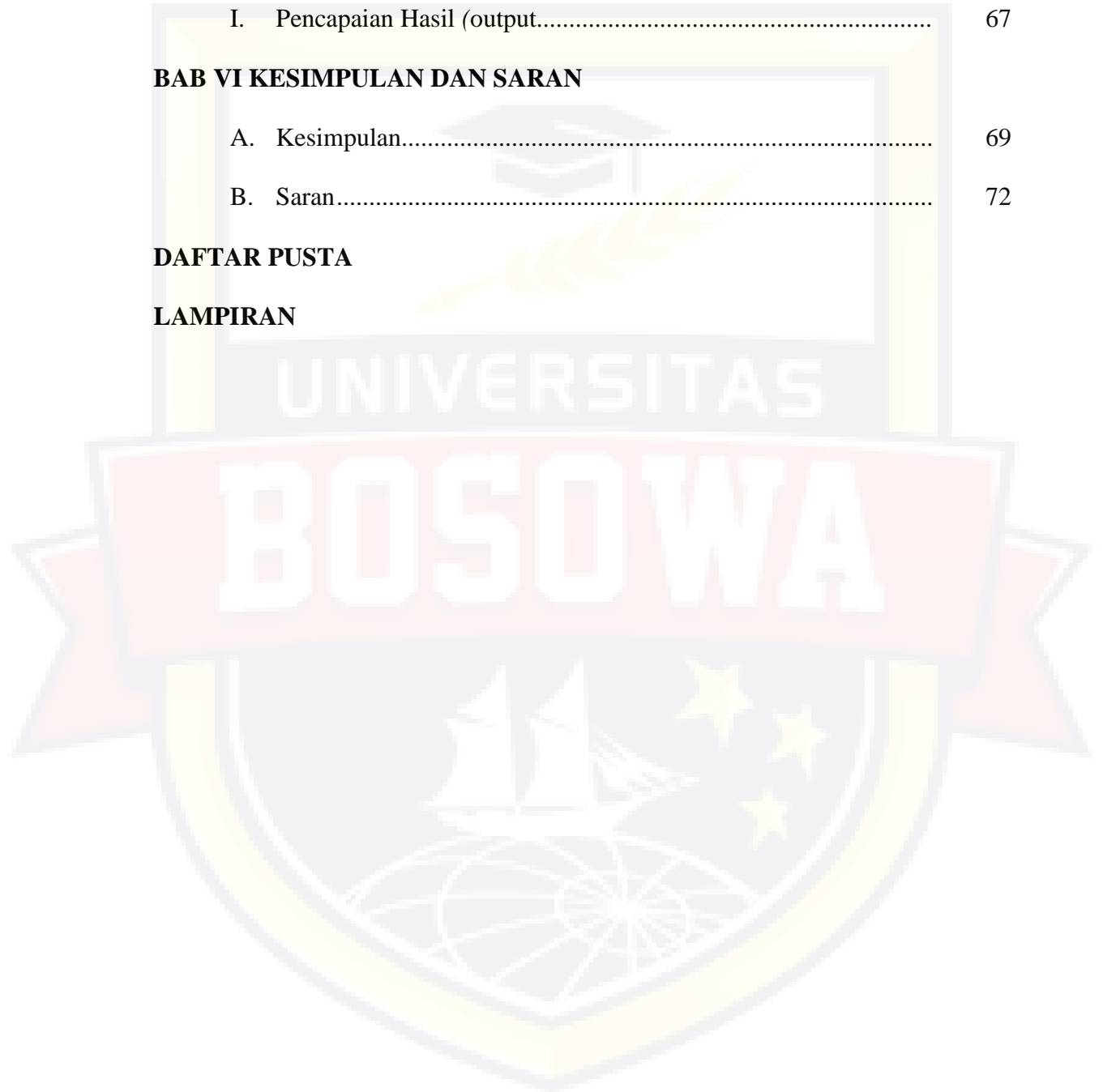
G. Serana Dan Prasarana.....	61
H. Keringanan biaya Sekolah bagi orang tua Siswa	66
I. Pencapaian Hasil (output).....	67

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Hamdan Moh Lenggo 4513022012, Jurusan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Bosowa Makassar, dengan judul *Sikripsi Dampak Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) Terhadap keluarga miskin Di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende*. Dibimbing oleh Dr. Syamsul Bhari.S.Sos.,M.SI selaku pembimbing I dan Dr. Muh Rusdi Maidin,S.H.M.SI selaku pembimbing II

Pendekatan partisipatif sangat mendukung tingkat keberhasilan pembangunan. Demikian juga dalam program Bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah SD. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menganalisa setiap gejala atau fenomena yang menghambat kegiatan pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini.

Aspek- aspek dalam penelitian yang menjadi acuan adalah Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, tahap pemanfaatan dan pada tahap evaluasi. Dengan metode deskriptif kualitatif, aspek tersebut ditelaah, penelaah ini menggunakan informen kunci dan informen pendukung sebagai pembanding. Dengan teknik wawancara peneliti mengumpulkan data dan menganalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan berupa ide dan gagasan. Dalam hal ini, masyarakat menyepakati bidang pengembangan infrastruktur sebagai prioritas karena masyarakat membutuhkan infrastruktur dengan bidang kerja adalah pembangunan talud pengaman banjir. Pada tahap pelaksanaan berupa tenaga, waktu dan materi. Masyarakat juga melaksanakan fungsi pengawasan hingga pada saat terbentuknya tim pengawas dari kalangan masyarakat itu sendiri sampai pemanfaatan hasil program. Pada tahap evaluasi dilaksanakan evaluasi proses dan evaluasi akhir. Evaluasi proses dilaksanakan secara baik namun pada evaluasi akhir masyarakat tidak dilibatkan secara menyeluruh dengan alasan waktu terdesak oleh kegiatan desa yang lain.

Kata Kunci : Dampak, Bantuan, Dana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Karena perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat dan kualitas serta tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Namun sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, hal ini disebabkan antara lain, karena mahal biaya pendidikan dan orang miskin memang tidak ada biaya untuk pendidikan dikarenakan lebih mengutamakan biaya untuk makan.

Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit yang menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai permasalahan yang kian nampak yang semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka.

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Apakah tercapai jika pendidikan yang berkualitas tidak mampu dijangkau oleh semua kalangan. Hanya kalangan orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya, orang kaya dan berkuasa. Bagaimana dengan orang miskin tidak ada yang bisa menjamin tingkat keberhasilan pendidikannya, faktor finansial alasan utama mereka, untuk menjamin bahwa setiap anak dapat memperoleh pendidikan dasar yang gratis dibutuhkan konsitusi atau undang-undang di setiap negara yang secara ekspilisit menjelaskan bahwa setiap anak berhak

memperoleh pendidikan dasar secara adanya konsitusi tersebut maka di harapkan setiap negara berusaha memenuhi kewajiban kepa setiap warganya yang memiliki hak atas pendidikan gratis yang bermutu tersebut. Namun keluarga miskin belum memperoleh perhatian layak dalam menggapai hak-haknya dibidang pendidikan,kesehatan,,sosial,dan keamanan. Dengan demikian mereka praktis belum dapat mengapai tingkat kesajatraan maksimal. Perlindungan terhadap anak-anak dari keluarga miskin belum dapat di upayakan secara maksimal karena alokasi anggaran untuk membiyai kegiatan sektoral ini tergolong minim sekali. Untuk itulah pada tahun ajaran 2005-2006 pemerintah mulai menggulirkan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS ini diambil dari program kompensasi pengurangan subsidi BBM. Secara nasional besarnya elokasi ini Rp 5,6 triliun. Rincian BOS ini dihitung dari jumlah siswa disetiap sekolah. Sekolah dasar akan menerima Rp 19,580 per anak per bulan,se sedangkan sebesar Rp 27.000 per anak per bulan. Jumlah ini diterimah sekolah dalam 6 bulan sekali melalui rekening sekolah Alokasi dana ini nantinya akan dimasukan kedalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tiap sekolah sehingga penggunaan harus sesuai kebutuhan sekolah.

Setelah itu,sekolah harus membuat rencana pengambilan dana per bulannya mengacuh pada pos kebutuhan dalam RAPBS sehingga nantinya pengambialan dana BOS oleh sekolah dibatasi penggunaan dana BOS menurut juknis BOS 2012 dapat digunakan dalam 13 komponen, diantaranya pembelian/penggadaan buku teks pembelajaran, pembiyaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru,pembiyaan kegiatan pembelajaran, pembiyaan ulangan, pembelian bahan-bahan habis pakai,pembiyaan langganan daya dan jasa,pembiyaan peralatan sekolah,pembayaran honorariun bulanan guru honorer dan tetga pendidikan honorer,pengembangan profesi guru, pemberian bantuan biayatranspotasi bagi siswamiskin yang menghadapi masalah biaya transporttasi bagi siswa miskin,pembiyaan pengelolaan BOS, pembelian computer,dan membeli alat-alat peraga,media pembelajaran,mesin

ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah itupun jika ada dana tersisa. (petunjuk Teknis BOS 2012). Dengan adanya dana BOS ini harus ada kepastian bahwa tidak ada lagi keluarga miskin yang putus sekolah karena alasannya financial seperti tidak mampu membeli seragam, alat tulis, dan biaya-biaya lainnya. Tidak hanya itu saja, BOS juga harus menjamin semua anak miskin dana tidak miskin harus melanjutkan tingkat sekolah dasarnya (SD/ sederajat) ke jenjang SMP/ sederajat dan berhasil dalam pendidikannya. Adanya dana BOS menjadi titik temu permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia, dengan adanya program pendidikan gratis tentu sangat membantu dan meringankan beban bagi keluarga miskin yang ingin bersekolah tetapi terkendala oleh dana.

Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan untuk mengatasi permasalahan ini, BOS secara umum sudah mulai berhasil meningkatkan keberhasilan pendidikan masyarakat miskin yang kekurangan biaya dalam proses pendidikannya. Termaksud didalamnya terdapat bantuan transport ke sekolah, dan bantuan buku dari dana BOS tersebut dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak bantuan dana BOS terhadap keluarga miskin di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Operasionalisasi dana BOS di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian tersebut di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui realisasi bantuan dana BOS di MIS Nur Al-Anshar Wolonawa Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui dampak bantuan dana BOS terhadap prestasi belajar keluarga miskin di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis berharap kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin, antara lain:

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangan dan informasi terhadap masyarakat luas mengenai Bagaimana Dampak bantuan dana BOS terhadap keluarga miskin.
 - b. Dapat membantu peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian.
 - c. Bagaimana Dampak bantuan dana BOS terhadap pendidikan keluarga miskin agar penelitian yang dilakukanya lebih baik lagi.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Teori Struktural Fungsional

Dalam penelitian ini menggunakan teori structural fungsional untuk menganalisis masalah pengaruh bantuan dana BOS terhadap tingkat keberhasilan pendidikan keluarga miskin. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu system social yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dan system social, fungsional terhadap system yang lain. (George Ritzer, 2010 : 21).

Sekolah merupakan salah satu institusi pemerintah yang khusus menangani masalah pendidikan. Di dalam sekolah tentunya terdapat struktur seperti kepala sekolah, guru, tata usaha, dan siswa. Semuanya merupakan satu kesatuan yang masing-masing fungsi tersendiri dalam sekolah untuk menciptakan suatu stabilitas.

Di pihak luar sekolah terdapat orang tua/wali/keluarga siswa. Jika dikaitkan dengan masalah dalam penelitian ini terdapat juga keterkaitan antara pihak sekolah dan pihak keluarga siswa dalam memberi arahan kepada sang anak. Pendidikan tidak hanya diberikan oleh sekolah saja, pendidikan dari keluarga juga diperlukan. Artinya antara pihak sekolah dan pihak keluarga siswa saling bahu-membahu menjadi satu kesatuan dalam mendidik anak agar menjadi siswa rajin dan berprestasi dan memperoleh keberhasilan dalam pendidikannya.

Jika dikaitkan dengan dana BOS, dalam hal ini dana BOS sangat berfungsi dalam membantu siswa secara financial, utamanya bagi siswa yang tergolong miskin. Dana BOS ini disalurkan ke sekolah-sekolah tingkat SD/ sederajat dengan adanya bantuan ini meringankan beban keluarga yang miskin mereka tidak harus mengeluarkan biaya berlebihan lagi untuk

memfasilitasi anaknya. Contoh, buku-buku pembelajaran tidak mesti di beli lagi karena sudah disiapkan berkat dana BOS ini, mereka juga tidak perlu lagi membayar uang SPP dan keperluan lainnya.

Jadi antara pihak sekolah dana BOS, orang tua siswa, siswa ini keempatnya satu kesatuan yang masing-masing berbeda namun memiliki fungsi masing-masing untuk menciptakan suatu keadaan yang stabil Neofungsionalisme lahir dari tokoh Jeffrey C alexander yang mengemukakan kritik internal terhadap pandangan-pandangan teori fungsional dengan memperluas lingkup kajian intelektualnya sembari mengacu kepada dasar pemikiran fungsionalisme itu sendiri. Neofungsionalisme memimiliki orientasi berupa membuat model deskripsi masyarakat dengan pola-pola tertentu, berorientasi kepada level makro dengan memperhatikan struktur social dan budaya. Fenomena yang mengandung kemungkinan. Fenomena budaya dapat melahirkan ketegangan tersendiri dan perubahan social yang berlangsung melalui differensiasi dalam system kepribadian, budaya dan system social. Ada tiga unsur dalam desain pembelajaran menurut penganut fungsionalis,yang pertama adalah kurikulum yang di angkat berdasarkan gagasan,konsep dan jenis pengetahuan yang ada dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya. Dengan adanya nilai budaya yang terdapat dalam kurikulum yang kemudian di kembangkan menjadi karakteristik. Yang kedua adalah peranan guru yang bertugas untuk mengembangkan rasa tanggung jawab siswa ketika hidup dalam lingkungan kelompoknya, mendorong untuk membangun kesetiaan terhadap cita-cita dan nilai-nilai kelompok,berusaha mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mengembangkan dan mematangkan skill siswa dengan keahlian yang di perlukan masyarakat. Kaum fungsionalis menganggap murid sebagai kotak kosong yang harus diisi oleh seorang guru,dalam hal ini proses pembelajaran masih berpusat pada guru sebagai sumber informasi.

Di mata penganut fungsionalis pendidikan harus mengacu kepada nilai-nilai kolektif yang di jadikan pengembangan tertib masyarakat. Prinsip moral yang ada di masyarakat di

angkat melalui kurikulum dan di terapkan di sekolah dengan tujuan siswa mampu menjadi bagian untuk berperilaku baik demi terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan berperilaku tidak menyimpang. Sekolah harus menjadi institusi atau agen pencipta tertib social melalui siswa.

1. Robert K. Merton

Merton adalah murid Talcott Parsons di Universitas Harvard, dan menjadi orang pertama yang memperoleh gelar Ph.D. Sejak awal tahun 1940an ia bekerja di Columbia University, Di kalangan ahli sosiologi ia memiliki reputasi tersendiri. Merton adalah tokoh dalam tradisi fungsionalisme structural, dengan corak *middle range theory* yang banyak memakai referensi dari Max Weber, William I. Thomas, dan Emile Durkheim

Merton juga mengkritik teori – teori fungsional sebelumnya, termasuk karya gurunya Parsons yang ia nilai terlalu asyik dengan gaya berteori yang muluk-muluk (*grandiose*) dan berpotensi membangun teori besar (*grand theory*), dengan implikasi meremehkan teori-teori yang lebih kecil. Merton dalam hal ini menawarkan 5 perspektif yang diurainya lebih baik :

1. Karena teori fungsional sebelumnya terlalu berfokus pada *grand theory* (makro), sehingga sukar melihat rujukan empiris, maka Merton menawarkan *middle-range theory*.
2. Jika sebelumnya teori fungsional terlalu makro maka masyarakat menjadi full integration jika diturunkan ke *middle-range theory* tidak akan terlihat seperti itu
3. Betul fungsional, tapi harus dibedakan bentuk kontribusinya, mana fungsi yang menyebabkan kemunculan sesuatu dan mana yang menyebabkan sesuatu itu bertahan.
4. Jika sebelumnya teori fungsional mencampurkan antara *subjective disposition* dan *objectives concequences*, menurutnya keduanya harus dibedakan antara mana yang manifest dan yang laten

5. Teori sebelumnya kurang memberikan perhatian pada perubahan walaupun ada itu adalah perubahan yang bersifat evolusi linear namun Merton menawarkan perubahan sosial.

Dalam membangun teorinya, Merton mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus di jawab, salah satu pertanyaan yang ia jawab ialah pertanyaan yang berkaitan dengan tiga proposisi fungsional :

1. Tidak mungkin kesatuan fungsional dapat mendorong terjadinya integrasi secara tuntas
2. Tidak mungkin mengikuti argument fungsional yang berpandangan universal, dalam arti seluruh bentuk social dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif.
3. *Indispensability* atau klaim fungsional yang menyatakan setiap tipe peradaban, kebiasaan, ide, obyek material dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan system sebagai keseluruhan.

Merton juga menyoal tentang ketidakjelasan batasan yang dibuat teori fungsional, tentang motivasi dan konsekuensi obyektif, Merton juga sependapat dengan Parsons bahwa tindakan yang mapan atau terjadi berulang kali akan mempengaruhi bertahannya suatu sistem social, tapi Merton tidak memfokuskan kepada orientasi subyektif individu, yang sadar dapat di orientasikan untuk memenuhi persyaratan fungsional.

Merton menunjukkan bahwa motivasi yang secara sadar dan di ketahui diorientasikan kepada upaya menyumbang terpenuhinya syarat fungsional, tiada lain adalah fungsi manifest atau motif yang dimaksudkan, sedangkan dalam praktek tak jarang dijumpai fungsi laten yakni motive dengan konsekuensi obyektif yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui pembedaan antara motive dan konsekuensi obyektif dalam bagian di atas

1. Pendidikan dan Kesadaran Kolektif

Nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah tidak lain adalah konsekuensi dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Mereka yang lebih tua menanamkan nilai-nilai teladan kepada mereka yang muda agar mereka siap secara fisik dan mental untuk memasuki dunia masyarakat yang lebih luas.

Dalam konsep Durkheim, perubahan solidaritas mekanik di sekolah menjadi mode solidaritas organik hal ini karena hasil dorongan dari praktik mode solidaritas organik yang terjadi di masyarakat. Kesadaran kolektif adalah nilai-nilai kemasyarakatan yang merupakan konsensus masyarakat untuk mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran kolektif itu bisa berupa aturan moral, aturan agama, dan lain sebagainya. Dengan demikian, guru harus menyadari otoritasnya karena guru merupakan pengemban nilai-nilai kolektif dan pemegang tanggung jawab untuk mentransformasikan kepada siswanya.

6 Kekuatan dan Kelemahan menurut Pandangan Durkheim tentang Pendidikan.

Kekuatan pandangan Durkheim tentang pendidikan adalah:

1. Memperbaiki metode berpikir sosiologis berdasarkan pemikiran-pemikiran filosofis menjadi ilmu pengetahuan yang benar berdasarkan fakta-fakta yang dapat diobservasi
2. Memberi sumbangan dalam memperlihatkan pemikiran dengan metodologi holistik
3. sedangkan kelemahan pandangan Durkheim tentang pendidikan adalah:
4. Adanya pandangan pesimis yang diterapkan ke dunia pendidikan
5. Teorinya tidak peka terhadap munculnya unsur konflik dan kekuasaan dalam hubungan sosial
6. Klaim Durkheim yang menyatakan bahwa ketika pembagian kerja meningkat maka akan meningkatkan pembagian organisasi pendidikan.

2. Talcott Parsons

Talcott Parsons lahir tahun 1902 di Colorado Springs, Ia adalah putera pendeta, sarjana mudanya mengambil di Kolese Amherst (1920-1924), program pasca sarjananya di London School of Economics (1924), setelah itu ia melanjutkan ke Heidelberg (1925-1926) dan di situ ia berkenalan dengan Max Weber Parsons dikenal sebagai penggagas structural fungsional yang memfokuskan pada masalah system tindakan dan system social ini merupakan refleksi dari pengaruh sosiolog Italia, Vilfredo Pareto, oleh karena itu pertanyaan yang ia ajukan lebih ke arah membangun, keseimbanganm tertib dan keteraturan social.

Pemikiran dan gagasannya banyak dipengaruhi oleh Durkheim terutama tentang pandangannya tentang kesamaan antara manusia dengan organisme hidup, pengaruh ini tampak saat Parsons menyusun jawaban yang berkaitan dengan tertib social, ia berargumentasi bahwa tertib social disebabkan oleh 3 hal penting, yaitu, pertama nilai-nilai budaya yang dibagi bersama, kedua nilai yang dilembagakan menjadi norma social dan ketiga nilai yang dibatinkan individu menjadi motivasi-motivasi, melalui bukunya *The Structure of Social Action* ia menempatkan individu sebagai unit analisis, hal ini karena individu memiliki kemauan subyektif yang bersifat voluntaristik.

a. Variabel Pola Pengelompokan Sistem Sosial

Parsons mengambil gagasan mengenai hukum evolusi dalam masyarakat, yang berla ku juga dalam pembentukan pola tindakan, menurut Parsons masyarakat memiliki dua alternative terpola, terdiri dari pasangan berbeda yang masing-masing terdiri atas lima variable :

1. Perasaan (affectivity) atau netral perasaan (affectivite neutral), dalam hal ini actor dihadapkan kepada problem penentuan sikap, menghayati fenomena social, seberapa tingkat emosi, dan perasaan digunakan dalam menghadapi fenomena tertentu

2. Arah diri (self-orientation) atau arah kolektif (collectivity orientation), dalam hal ini actor dihadapkan pada pilihan untuk memilih kepentingan diri atau membagi energinya untuk kepentingan umum.
3. Partikularisme atau universalisme, dalam hal ini actor dihadapkan apakah harus bertindak atas dasar prinsip-prinsip umum yang berlaku tanpa pilih kasih atau menjalankan tindakan karena relasi-relasi khusus
4. Status bawaan (ascription) atau status prestasi diri (achievement) dalam hal ini persoalan yang dihadapi adalah berkaitan dengan penentuan sesuatu apakah atas dasar pembawaan ataukah karena prestasi.
5. Campur baur (diffuse) atau spesifikasi (specifity), kali ini actor dipersilahkan untuk memilih memfungsikan dirinya sebagai bagian dari fungsi social tertentu atau memerankan diri dalam keseluruhan fungsi yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan dalam prespektif fungsional harus dikembangkan berdasarkan proporsi berikut. Pertama, susunan individu. Kedua, abstraksi dari individu. Ketiga fenomena social hanya memiliki realitas dalam individu. Keempat, mengetahui perilaku individu. Kelima, mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalmnya. Kajian sosiologi pendidikan dari prespektif fungsional difokuskan kepada pendidikan sebagai realitas social, pendidikan dan struktur social, pendidikan sebagai pranata social, hubungan pendidikan sebagai pranata social dengan pranata-pranata social yang lain. fakta social disini dimaksudkan ke dalam kenyataan empiris. Di dalam dunia pendidikan terdapat fakta social yang saling berjkaitan satu sama lain. selain ketergantungan mereka bukan pda tataran individu melainkan pada level entitas atau kelompok. Contoh entitas guru, kepala sekolah, komite sekolah, entitas siswa atau orang tua dan seterusnya.

Menurut emile Durkheim fakta social dibedakan menjadi dua , yakni : material dan non-material. Material yang merupakan semua yang dapat dilihat seperti komite sekolah , organisasi

wali murid, dan lain lain. biasanya berbentuk komponen perubahan morfologi masyarakat. Sedangkan yang bersifat non-material sesuatu yang dianggap nyata namun masih abstrak seperti, kesadaran solidaritas, moralitas dan lain-lain.

Implikasi menurut Durkheim ini diimplikasikan untuk membaca pendidikan dan didasarkan untuk menciptakan titik ekuilibrium pada dunia pendidikan. Sebagai dasar dari penciptaan ekuilibrium tidak boleh menggunakan kekerasan dan paksaan. Bila melalui hal tersebut sistem tersebut terjadi ketegangan yang akan mengalami disfungsi. Keberadaan perilaku menyimpang dalam sebuah sistem, dipandang sebagai bagian dari keberlangsungan dalam sebuah sistem. Fakta social ini terutama memfokuskan perhatian terhadap analisa pada level makro obyektif. Studi makro dalam sosiologi pendidikan antara lain berkaitan dengan kajian terhadap pendidikan dan interelasinya dengan struktur social, institusi masyarakat dan hubungannya dengan hukum, birokrasi, arsitektur, teknologi juga bahasa. Dalam sosiologi pendidikan membahas dalam ranah makro subjektif seperti masalah budaya sekolah dan masyarakat, terutama akibat pengaruh dari faktor-faktor struktural seperti perkembangan teknologi, sistem politik, pemerintahan, ekonomi dan lain-lain yang semuanya itu akan membentuk ekuilibrium dan mekanisme consensus. Yang akan menjadikan tumbuhnya kesadaran integrasi social dan menghindarkan adanya disintegrasi social Oleh karena itu cakupan bersekala makro , tujuan analisisnya adalah mencari hukum-hukum universal dan bukan menelusuri keunikan dari sebuah fenomena. Teori struktural fungsional lebih terpusat pada kelompok dan sistem social sebagai unit analisis. Sekolah sebagai institusi, sistem dan kelompok kependidikan sebagai unit analisis. Tidak digunakan untuk tujuan memahami kesadaran individu melainkan untuk kepentingan semua orang yang berada dalam institusi, sistem dan dimana pendidikan diselenggarakan

Kritik terhadap Parsons

Ganjalan yang amat dirasakan pada Parsons adalah obsesinya untuk membangun harmoni, tertib, dan integrasi masyarakat, Dalam dunia pendidikan pandangan Parsons tidak banyak menuai kritik, namun penjelasan-penjelasan Parsons terasa tidak disertai dengan bukti empiric yang luas, Parsons juga mencoba menjawab bahwa teorinya tidak bias structural dan karenanya ia mencoba menjelaskan tindakan voluntarisme actor, karena tindakan actor pada hakikatnya adalah refleksi kehendak struktur, Parsons harus disebut sebagai eksponen yang menyebabkan teori structural fungsional ini memiliki bobot dan pengaruh yang luas dalam dunia sosiologi. Para penganut pandangan structural fungsional percaya bahwa pendidikan dapat digunakan sebagai jembatan untuk menciptakan tertib sosial. Pendidikan dijadikan sebagai media sosialisasi kepada generasi muda untuk mendapatkan pengetahuan, perubahan perilaku dan penguasaan tata nilai yang diperlukan sebagai anggota masyarakat. Auguste Comte (1798-1857) yang dikenal sebagai bapak sosiologi yang memelopori filsafat positivistic, berpendapat bahwa pengetahuan dan masyarakat dalam proses transisi secara evolusi. Tugas sosiologi disini untuk memahami faktor-faktor yang diperlukan dalam evolusi masyarakat. Semuanya itu nantinya bertujuan untuk menciptakan tertib sosial yang baru. Pendidikan lah yang digunakan sebagai tempat untuk mengembangkan tradisi pengetahuan *positivistic*, sehingga siswa dapat berpikir *positive* sehingga segala sesuatu dapat dijelaskan dengan sebab-akibat. Evolusi tertib sosial melalui tiga tahap yaitu; tahap teologis, tahap metafisik dan tahap ilmiah. Comte percaya bahwa masyarakat selalu tumbuh melalui tiga tahap sesuai dengan tingkat kompleksitas masyarakat.

Namun dalam perkembangannya perspektif structural fungsionalis mengalami kemerosotan. Colomny (1990) menyimpulkan bahwa teori fungsional telah berubah menjadi tradisi.

1. Talcott Parsons tentang Kelas Belajar

Pada umumnya karya Parsons lebih memfokuskan kepada masalah system social di masyarakat, namun essaynya tentang “Kelas di Sekolah sebagai System Social” ia melakukan analisis di kelas, lalu ia merumuskan definisi dua fungsi penting kelas pembelajaran yakni sebagai alat sosialisasi dan seleksi, fungsi sosialisasi di sini tentu fokus dari kajian Durkheim, fungsi sosialisasi dapat dirangkum di sini tentang komitmen dan kemampuan individu yang digunakan di masa depan. Ketika membahas pandangan Durkheim itu akan mengacu pada peran yang diambil siswa di masyarakat di masa depan di sinilah fungsi “seleksi” dimana siswa dari berbagai lapangan pekerjaan atau jabatan mensosialisasikan pilihannya ke masyarakat.

Menurut Parsons dasar yang dipakai sekolah untuk menempatkan siswa untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan sekolah adalah prestasi, pada kelas awal penyelesaian tugas diukur dari moral dan intelektual, memasuki kelas yang lebih tinggi penyelesaian masalah diukur dari aspek intelektual, Parsons percaya sekolah memberikan reward berdasarkan prestasi, Parsons juga berpendapat bahwa dalam masyarakat modern penempatan jabatan haruslah berdasarkan kemampuan di bidang tersebut, di masyarakat sederhana menempatkan jabatan tidak berdasarkan prestasi, namun di masyarakat industri penempatannya berdasarkan prestasi.

Tugas pertama sosialisasi adalah sekolah harus mengajarkan ke siswa bahwa mereka akan dinilai berdasarkan prestasi, lagipula Parsons percaya telah terjadi kesepakatan umum bahwa dalam menetapkan ranking atau penghargaan di sekolah atau di masyarakat adalah prestasi, tapi pemberian reward di kelas secara tidak adil berpotensi untuk menciptakan kehancuran, namun karena anak-anak sudah menyadari bahwa penilaian terhadap seseorang berdasarkan prestasi maka masalahnya tinggal memastikan apa penilaian tersebut telah diberikan secara adil atau tidak, dengan 2 fungsi utama maka sekolah menjalankan dan menentukan mekanisme proses pembelajaran yang dimana dapat melahirkan sumberdaya

manusia yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan masyarakat dengan tingkat kompleksitas yang dimilikinya.

a. Kritik terhadap Parsons

Ganjaan yang amat dirasakan pada Parsons adalah obsesinya untuk membangun harmoni, tertib, dan integrasi masyarakat, Dalam dunia pendidikan pandangan Parsons tidak banyak menuai kritik, namun penjelasan-penjelasan Parsons terasa tidak disertai dengan bukti empiric yang luas, Parsons juga mencoba menjawab bahwa teorinya tidak bias structural dan karenanya ia mencoba menjelaskan tindakan voluntarisme actor, karena tindakan actor pada hakikatnya adalah refleksi kehendak struktur, Parsons harus disebut sebagai eksponen yang menyebabkan teori structural fungsional ini memiliki bobot dan pengaruh yang luas dalam dunia sosiologi.

3. Robert K. Merton

Merton adalah murid Talcott Parsons di Universitas Harvard, dan menjadi orang pertama yang memperoleh gelar Ph.D. Sejak awal tahun 1940an ia bekerja di Columbia University, Di kalangan ahli sosiologi ia memiliki reputasi tersendiri.

Merton adalah tokoh dalam tradisi fungsionalisme structural, dengan corak *middle range theory* yang banyak memakai referansi dari Max Weber, William I. Thomas, dan Emile Durkheim Merton juga mengkritik teori – teori fungsional sebelumnya, termasuk karya gurunya Parsons yang ia nilai terlalu asyik dengan gaya berteori yang muluk-muluk (*grandiose*) dan berpotensi membangun teori besar (*grand theory*), dengan implikasi meremehkan teori-teori yang lebih kecil.

1. Merton dalam hal ini menawarkan 5 perspektif yang diurainya lebih baik Karena teori fungsional sebelumnya terlalu berfokus pada *grand theory* (makro), sehingga sukar melihat rujukan empiris, maka Merton menawarkan *middle-range theory*.

2. Jika sebelumnya teori fungsional terlalu makro maka masyarakat menjadi full integration jika diturunkan ke *middle-range theory* tidak akan terlihat seperti itu
3. Betul fungsional, tapi harus dibedakan bentuk kontribusinya, mana fungsi yang menyebabkan kemunculan sesuatu dan mana yang menyebabkan sesuatu itu bertahan.
4. Jika sebelumnya teori fungsional mencampurkan antara *subjective disposition* dan *objectives consequences*, menurutnya keduanya harus dibedakan antara mana yang manifest dan yang laten
5. Teori sebelumnya kurang memberikan perhatian pada perubahan walaupun ada itu adalah perubahan yang bersifat evolusi linear namun Merton menawarkan perubahan social.

Dalam membangun teorinya, Merton mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus di jawab, salah satu pertanyaan yang ia jawab ialah pertanyaan yang berkaitan dengan tiga proposisi fungsional :

1. Tidak mungkin kesatuan fungsional dapat mendorong terjadinya integrasi secara tuntas
2. Tidak mungkin mengikuti argument fungsional yang berpandangan universal, dalam arti seluruh bentuk social dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif.
3. *Indispensability* atau klaim fungsional yang menyatakan setiap tipe peradaban, kebiasaan, ide, obyek material dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan system sebagai keseluruhan.

Merton juga menyoal tentang ketidakjelasan batasan yang dibuat teori fungsional, tentang motivasi dan konsekuensi obyektif, Merton juga sependapat dengan Parsons bahwa tindakan yang mapan atau terjadi berulang kali akan mempengaruhi bertahannya suatu sistem

social, tapi Merton tidak memfokuskan kepada orientasi subyektif individu, yang sadar dapat di orientasikan untuk memenuhi persyaratan fungsional.

Merton menunjukkan bahwa motivasi yang secara sadar dan di ketahui diorientasikan kepada upaya menyumbang terpenuhinya syarat fungsional, tiada lain adalah fungsi manifest atau motif yang dimaksudkan, sedangkan dalam praktek tak jarang dijumpai fungsi laten yakni motive dengan konsekuensi obyektif yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui perbedaan antara motive dan konsekuensi obyektif dalam bagian di atas. Neofungsionalisme lahir dari tokoh Jeffrey C alexander yang mengemukakan kritik internal terhadap pandangan-pandangan teori fungsional dengan memperluas lingkup kajian intelektualnya sembari mengacu kepada dasar pemikiran fungsionalisme itu sendiri. Neofungsionalisme memiliki orientasi berupa membuat model deskripsi masyarakat dengan pola-pola tertentu, berorientasi kepada level makro dengan memperhatikan struktur social dan budaya. Fenomena yang mengandung kemungkinan. Fenomena budaya dapat melahirkan ketegangan tersendiri dan perubahan social yang berlangsung melalui differensiasi dalam system kepribadian, budaya dan system social. Ada tiga unsur dalam desain pembelajaran menurut penganut fungsionalis, yang pertama adalah kurikulum yang di angkat berdasarkan gagasan, konsep dan jenis pengetahuan yang ada dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya. Dengan adanya nilai budaya yang terdapat dalam kurikulum yang kemudian di kembangkan menjadi karakteristik. Yang kedua adalah peranan guru yang bertugas untuk mengembangkan rasa tanggung jawab siswa ketika hidup dalam lingkungan kelompoknya, mendorong untuk membangun kesetiaan terhadap cita-cita dan nilai-nilai kelompok, berusaha mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mengembangkan dan mematangkan skill siswa dengan keahlian yang di perlukan masyarakat. Kaum fungsionalis menganggap murid sebagai kotak kosong yang harus diisi oleh seorang guru, dalam hal ini proses pembelajaran masih berpusat pada guru sebagai sumber informasi. Di mata penganut fungsionalis pendidikan harus mengacu kepada nilai-nilai kolektif yang di

jadikan pengembangan tertib masyarakat. Prinsip moral yang ada di masyarakat di angkat melalui kurikulum dan di terapkan di sekolah dengan tujuan siswa mampu menjadi bagian untuk berperilaku baik demi terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan berperilaku tidak menyimpang. Sekolah harus menjadi institusi atau agen pencipta tertib social melalui siswa.

B. Tinjauan Tentang Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Biaya satuan pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata siswa setiap tahun sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BSP di bedakan menjadi BSP investasi dan BSP Operasional. Panduan BOS (Depang RI, 2007 :9).

BSP investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya yang tidak habis pakai waktu lebih dari satu tahun, seperti pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot an alat kantor. Sedangkan BSP operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang. BSP operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil. panduan BOS (Depag RI, 2007 : 9).

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejatraan (honor kelebihan jam mengajar (KJM), pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur dan pengembangan profesi guru (pendidikan dan latihan guru, musyawara guru mata pelajaran (MGMP), musyawara kerja kepala sekolah (KKKS), kelompok kerja guru (KKG), dan lain-lain. Biaya nonpresonil ialah biaya untuk penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan daya dan jasa, pembinaan dan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan duprevisi. Panduan BOS (Depag RI 2007 : 10).

Bantuan operasiaonal sekolah (BOS) yang dimaksud program secara konsep mencukup komponen untuk biaya operasional non porsonil hasil studi badan penelitian dan pengembangan , depertemen pendidikan nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena

biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Namun prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah. Pandua BOS (Depag RI, 2007 :10).

Menurut peraturan mendiknas no 69 tahun 2009 ,standar biaya operasi nonpresonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiyai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahunsebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian , ada beberapa jenis pembiyaan inetvasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS (Petunjuk Teknis BOS 2012).

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya penyediaan pendanaan biaya operaional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, dan pemeliharaan serana dan praserana,uang lembur, transportasi, konsumsi,pajak, asuransi dan lain-lain. Namun demikian ,ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Tujuan bantuan opsional sekolah secara umum menjadi yakni untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus dana BOS bertujuan untuk : Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri (terbuka) negeri terhadap biaya operasional sekolah kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional(SBI) sumbungan pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi

pendidikan sebagai kegiatan nirlaba. Sehingga sumbangan pungutan tidak boleh berlebih, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa disekolah swasta. (petunjuk Teknis BOS 2012).

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan termasuk SD-SMP satu atap dan tempat kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia. Panduan BOS (Depag RI, 2007 : 5)

C. Tinjauan Tentang Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Umar Tirtahardja (2000 : 33) mengemukakan bahwa pendidikan seperti sifat-sifatnya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifat yang sangat kompleks itu tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap.

Berikut di kemukakan batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya :

a. Pendidikan sebagai proses transformasi Budaya

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya satu generasi ke generasi yang lain. Seperti bayi lahir sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat dimana seorang bayi dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan – larangan dan ajuran-ajuran dan ajakan tertentu seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makanan, istirahat, berkerja, perkawinan, bercocok tanam dan seterusnya.

b. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis oleh karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap persinambungan (procedural) dan sistemik oleh karena berlangsung dalam sebuah situasi kondisi, di semua lingkungan yang saling mengisi (lingkungan rumah, sekolah, masyarakat).

c. Pendidikan Sebagai Proses Penyiapan Warga Negara

Pendidikan sebagai penyiapan warga Negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga Negara yang baik. Bagi kita warga Negara yang baik, diartikan selaku pribadi yang tau hak dan kewajiban sebagai warga Negara, hal ini ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tak ada kecualinya.

d. Pendidikan Sebagai Penyiapan Tenaga Kerja

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk berkerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja para calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena berkerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

2. Tujuan dan proses pendidikan

Tujuan dan proses pendidikan menurut Umar Tirtahardja (2000 : 37) yaitu :

a. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

b. Proses Pendidikan

Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen oleh pendidik terarah terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang menjadi utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. Sebab berkembangnya tingkah laku peserta didik yang optimal sebagai tujuan belajar hanya dimungkinkan oleh adanya pengalaman belajar yang optimal.

3. Permasalahan Pokok Pendidikan

Umar Titrahardja (200 : 226) pada dasarnya ada dua masalah pokok yang di hadapi oleh dunia pendidikan di tanah air, yaitu :

- a. Bagaimana semua warga negara dapat menningmati kesempatan pendidikan.
- b. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kanca kehidupan bermasyarakat

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional di harapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas luasya bagi seluruh warga negara indonesia untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaiman sistem dapat menyediakan kesempatan yang seluas luasya kepada seluruh warga negarah untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu dapat menjadi wahana bagi pembagunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.

D. Tinjauan Tentang Kemiskinan

Soerjono soekanto (2007 : 320) mendefinisikan bahwa kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana terdapat keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Munculnya kemiskinan lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal bagi seseorang, di mana ketidakmampuan untuk mendapatkan uang dari lingkungan hidupnya akibat keterbatasan hidup yang memiliki, baik pengetahuan, atau ilmu pengetahuan maupun keterampilan terampil yang dimilikinya.

Secara teoritis pengertian kemiskinan telah dikemukakan oleh Irawan dan Suparmoko (2003 : 26) bahwa kemiskinan dalam artian manusia adalah sedikit makan dan pakaian. Yang artinya kemiskinan sangat berkaitan dengan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan sandang dan pangan.

Menurut Gunawan Sumodingrat (1998 : 26) bahwa “ kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan”. Semakin kecil pendapatan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, dan papan maka orang tersebut dapat dikategorikan miskin.

Yusuf Qaradhawi (2002 : 1-10) berikut berbagai pandangan kalangan melihat kemiskinan dengan sudut pandang dan persepsi masing-masing:

1. Pandangan pemutus kemiskinan

Menurut pandangan kelompok ini, kemiskinan bukan suatu yang jelek dan perlu dihindari serta bukan pula termasuk masalah yang perlu diperdebatkan untuk dicari solusinya. Menurut kemiskinan justru merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai, agar hatinya mengingat kehidupan akhirat, benci kehidupan duniawi, berhubungan langsung dengan Allah dan penuh kasih sayang

terhadap manusia. Berbeda dengan orang kaya yang selalu lalai, melampaui batas dan cenderung melakukan tindakan kejahatan:

2. Pandangan jabaria

Kelompok ini menganggap kemiskinan merupakan bencana dan keburukan, tetapi sebagai ketentuan dari langit yang tidak bisa ditolak dan ditentang. Kemiskinan yang derita orang miskin dan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya dan orang kaya merupakan kehendak dan takdir dari Tuhan. Allah sengaja ingin mengangkat sebagian orang di atas orang lain dan serta membatasi risiko untuk orang yang dikehendaki, untuk menguji mereka tidak ada yang menolak ketentuannya.

3. Pandangan peyeruh kesalahan individual

Kelompok ini memandang kemiskinan ada bencana dan kejahatan, dan bahwa kemiskinan merupakan suatu problem kehidupan yang perlu dicari solusinya. Cuma solusi yang ditawarkan mereka tidak hanya terbatas pada sekedar memberikan pesan-pesan moral kepada orang-orang miskin agar rela dan berqanaah. Tetapi lebih maju satu langkah, yaitu bahwa mereka juga menyampaikan pesan-pesan moral kepada orang kaya untuk berani berkorban, melakukan kebajikan, dan bersedekah pada orang miskin.

4. Pandangan kapitalisme

Kelompok ini memiliki pandangan bahwa kemiskinan merupakan problem dan kesensaraan hidup. Tetapi yang bertanggung jawab atas keadaan tersebut adalah si miskin itu sendiri, bukan nasib, takdir, atau apa saja. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri yang memiliki kebebasan untuk memperlakukan harta yang dimilikinya sesuai dengan kehendak hatinya.

5. Pandangan sosialisme Marrxis

Kelompok ini memiliki pandangan bahwa upaya untuk menghapus kemiskinan dan menyadarkan orang-orang miskin tidak akan menjadi kenyataan kecuali menghancurkan kelas-kelas berjuis, merampas harta mereka dan membatasi kepemilikan harta, darimanpun sumber penghasilan.

Secara garis besar kemiskinan dapat dilihat dua macam, yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif (R.Amran, 2006 : 16) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemiskinan Absolut

Seorang dikatakan miskin absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, yang digambarkan dengan garis kemiskinan tersebut.

Kemiskinan absolut apabila tingkat pendapat masyarakat didalam suatu wilayah berada dibawah kemiskinan yang telah ditentukan. Seorang disebut miskin absolute apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang digambarkan dengan garis kemiskinan tersebut. Kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan sandang, kesehatan, pemahaman, dan pendidikan, yang diperlukan untuk bisa hidup dan berkerja. Kemiskinan absolut pada umumnya disandingkan dengan kemiskinan relative.

b. Kemiskinan Relatif

Menurut Gunawan Sumodinigrat (1998 : 27), bahwa "kemiskinan relative adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan". Seseorang sebenarnya tidak termaksud miskin, tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok lain yang pendapatannya lebih tinggi.

Jadi kemiskinan relative adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat lain yang lebih tinggi tingkat pendapatannya, walaupun pendapatan masyarakat itu menurut konsep garis kemiskinan sudah terlampaui, sudah diatas garis kemiskinan.

Misalnya pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia jauh lebih tinggi di bandingkan dengan Singapura, sehingga masyarakat Singapura disebut miskin. Sebenarnya kemiskinan relative dapat saja tidak dikategorikan miskin karena mungkin masih banyak masyarakat lainnya yang jauh lebih miskin.

Adapun penyebab kemiskinan telah di jelaskan panjang lebar oleh Gunawan Sumodinigrat (1998) dan Sritua Arif (1997), yang secara garis besar dapat di jelaskan sebagai berikut:

c. Kemiskinan Natural

Menurut Gunawan sumodinigrat (1998),” kemiskinan natural adalah keadaan miskin, karena dari asalnya memang miskin” kelompok masyarakat miskin ini karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam maupun sumber daya pembangunan lainnya sehingga mereka tidak dapat ikut pembangunan. Ataupun kalau ikut serta mereka hanya mendapatkan imbalan pendapatan yang rendah

Sedangkan menurut Sritua Arif (1997 :21) bahwa” kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti karna cacat, sakit, lanjut usia, atau karena bencana alam.

d. Kemiskinan structural

Menurut Sritua Arif (1997 : 21) bahwa” kemiskinan structural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor manusia seperti distribusi asset produksi yang tidak merata, kebijakan yang tidak adil, korupsi dan kolusi serta tatanan perekonomian yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

e. Kemiskinan cultural

Menurut Sritua Arif (1997), kemiskinan cultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh factor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros, dan lain-lain sebagainya, sedangkan menurut. Gunawan Sumodinigrat (1998 : 27),”kemiskinan

mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan hidup dan kebudayaan, dimana mereka sdh merasa kecukupan tidak merata kekurangan.

Jadi kemiskinan cultural disebabkan karena kondisi sosicial budaya masyarakat setempat yang mengacuh pada sikap hidup boros, yang disebabkan oleh gaya hidupnya, dimana mereka berkecukupan/tidak merata kekurangan padahal sebenarnya kebiasaan gaya hidup boros tidak perlu di lakukan akibatnya pendapatan rendah menurut ukuran umum.

E. Prestasi Belajar

Hamzah B. Uno (2008 : 3), motif merupakan daya pengerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan.

Hamzah B. Uno (2008 :8), konsep motivasi yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) seseorang tenang terhadap sesuatu, apabila ia dapat mempertahankan rasa senang maka akan termotivasi untuk melakukan kegiatan itu, dan 2) apabila seseorang merasa yakin mampu menghadapi tantangan maka bisanya orang tersebut terdorong untuk melakukan kegiatan tersebut. Celand dalam buku Hamzah B. Uno (2008 : 47) menekankan kepentingan kebutuhan berprestasi, karena orang yang berhasil dalam bisnis dan industry adalah orang yang berhasil menyelesaikan segala sesuatu. Ia menandai tiga motivasi utama yaitu: penggabungan, kekuatan, dan prestasi.

Trorndike dalam buku Hamzah B. Uno (2008 : 11) mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus (yang mungkin berupa fikiran, perasaan, atau gerakan) dan respons (yang juga bisa berupa fikiran, perasaan, atau gerakan) jelasnya perubahan tingkah laku dapat berwujud sesuatu yang komgkrit (dapat diamati), atau yang non konkret (tidak bisa di amti).

Belajar umumnya diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku seseorang setelah mempelajari suatu objek (pengetahuan,sikap,atau ketrampilan tertentu). Good Brophy,mengatakan belajar merupakan suatu proses atau interaksi yang dilakukan seseorang dalam memperoleh suatu yang baru dalam bentuk perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman itu sendiri.

Jadi kesimpulannya belajar adalah pemerolehan pengalaman baru oleh seseorang dalam bentuk perubahan perilaku yang relative menetap,sebagai akibat adanya proses dalam bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek (pengetahuan),atau melalui suatu penguatan dalam bentuk pengalaman terhadap suatu objek yang ada dalam lingkungan belajar.

Driscoll (dalam buku Hamzah B. Uno) menyatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam belajar,yaitu (1) belajar adalah suatu perubahan yang menetap dalam kinerja seseorang,dan (2) hasil belajar yang muncul dalam diri siswa merupakan akibat atau hasil dari interaksi siswa dengan lingkungan. Pernyataan ini dapat diartikan,apabilah siswa belajar maka hasil dapat dilihat dari kemampuan melakukan suatu kegiatan baru yang bersifat menetap daripada yang dilaakukan sebelumnya sebagai akibat atau hasil interaksi siswa dengan lingkungan.

Gagne (dalam buku Hamzah B. Uno,2008:16) mengistilakan perubahan perilaku akibat kegiatan belajar mengajar dengan kapabilitas. Disini kapabilitas diartikan berdasarkan atas adanya perubahan kemampuan seseorang sebagai akibat belajar yang berlangsung selama masa waktu tertentu.perubahan tersebut dapat berupa peningkatan kapabilitas (kemampuan tertentu dalam berbagai jenis kinerja ,sikap,minat,atau nilai.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia (1991 : 787) prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan,dikerjakan dan sebagainya)

Menurut W.js purwadarminto menyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai sebaik-baiknya kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap hal-hal yang dikerjakan

atau dilakukan. Jadi prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai menurut kemampuan yang tidak dimiliki dan ditandai dengan perkembangan serta perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang diperlukan dari belajar dengan waktu tertentu, prestasi belajar ini dapat dinyatakan dalam bentuk nilai dan hasil tes atau ujian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi yaitu ada dua yaitu sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam siswa. Faktor ini dapat dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- ❖ Faktor intelegensi dalam arti sempit adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang didalamnya berfikir perasaan. Intelegensi memegang peranan yang sangat penting bagi prestasi belajar siswa. Karena tingginya peranan intelegensi dalam mencapai prestasi belajar maka guru harus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bidang studi yang banyak membutuhkan berfikir rasional untuk mata pelajaran matematika faktor minat adalah kecenderungan yang mantap dalam subjek untuk merasa tertarik pada bidang tertentu. Siswa yang kurang berminat dalam pelajaran tertentu akan menghambat dalam belajar.
- ❖ Faktor keadaan fisik dan psikis. Keadaan fisik menunjukan pada tahap pertumbuhan, kesehatan jasmani, keadaan alat-alat indera dan lain sebagainya. Keadaan psikis menunjuk pada keadaan stabilitas atau labilitas mental siswa, karena fisik dan psikis yang sehat sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan belajar mengajar dan sebaliknya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: faktor guru, guru

sebagai tenaga berpendidikan memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan belajar, membimbing, melatih, mengolah Meneliti, dan mengembangkan serta memberikan teknik karena itu setiap guru harus memiliki wewenang dan kemampuan profesional, kepribadian dan kemasyarakatan. Guru juga menunjukkan fleksibilitas yaitu pendekatan deduktif dan gaya memimpin kelas yang diberi pelajaran, sehingga dapat menunjang tingkat prestasi siswa semaksimal mungkin.

❖ Faktor lingkungan keluarga

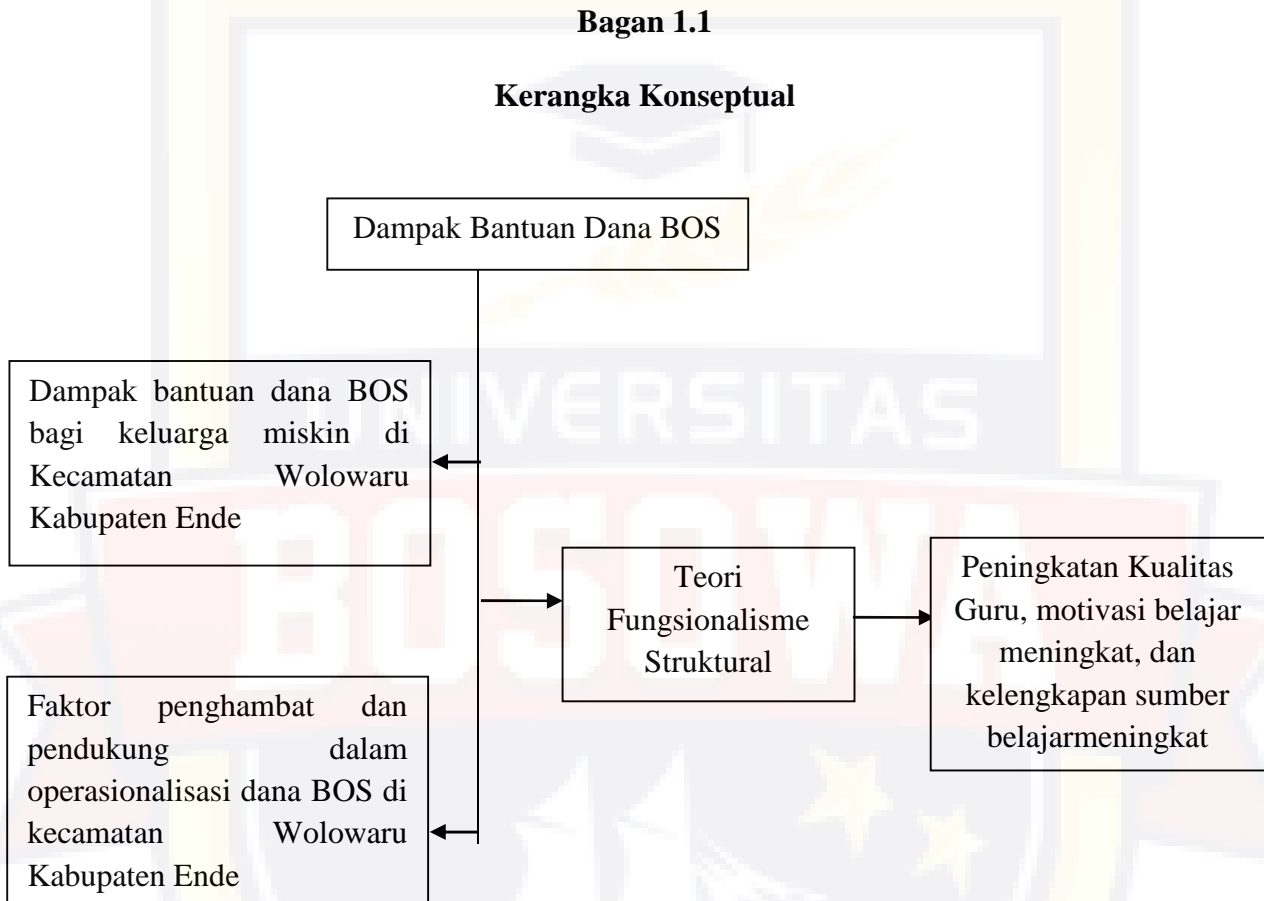
Lingkungan keluarga turut mempengaruhi kemajuan hasil kerja, bahkan mungkin dapat dikatakan menjadi faktor yang sangat penting, karena sebagian besar waktu belajar dilaksanakan di rumah. Keluarga kurang mendukung situasi belajar. Seperti kericuhan keluarga, kurang perhatian orang tua, kurang perlengkapan belajar akan mempengaruhi berhasil tidaknya belajar.

❖ Faktor sumber-sumber belajar

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam proses belajar adalah tersedianya sumber belajar yang memadai. Sumber belajar itu dapat berupa media atau alat bantu belajar serta bahan baku penunjang. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan perbuatan belajar. Maka pelajaran akan lebih menarik, menjadi konkret, mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga serta hasil yang lebih makna.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia (Creswell, 1998:15). Arief Furchan (1999:22) metode kualitatif ialah "proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri, menurutnya pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Adapun lokasi pada penelitian ini adalah di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena kebutuhan peneliti juga berasal dari daerah ini dengan alasan memudahkan keterjangkauan dalam proses penelitian.
2. Waktu penelitian, penelitian ini dilakukan selama 1 bulan.

C. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2014:80)

Merujuk pada judul diatas yakni Dampak Bantuan Dana BOS Terhadap Keluarga Miskin di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, maka yang menjadi populasi disini adalah 2 Sekolah Dasar dan 2 Keluarga miskin.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sample yang di ambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).

Penelitian ini menggunakan Sampling Purposive, Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampel di ambil 1 Sekolah SD, 1 MIS, dan 6 orang anak dari 2 keluarga.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. dengan kata lain teknik observasi ini lebih menggunakan indra, dan untuk mempermudahnya peneliti menggunakan media sebagai alat untuk membantu penulis dalam menyipkan data.

2. Interview

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* dan tidak *terstruktur*, dimana peneliti tidak menggunakan wawancara tidak *terstruktur*, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara tidak tersusun sistematis dan lengkap, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh keterangan tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengambil gambar atau foto-foto dan keterangan keterlibatan Siswa yang mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS).

E. Teknik Analisis Data

Susan Stainback mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kuantitatif, analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diskriptif, yakni data yang didapatkan di dalurkan melalui pemaparan dan uraian naratif, proses analisis data dilakukan sejenak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selai di lapangan.

Miles dan huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif, aktifitas dalam analisis data yaitu :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polahnya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mengembirakan gambaran yang lebih jelas. Dalam hal ini penulis mereduksi seluruh data mengenai penelitian menjadi dua bagian yaitu: dampak bantuan dana bos bagi keluarga miskin di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende dan faktor penghambat dan pendukung dalam operasionnalisasi dana BOS di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, sehingga data yang tidak mendukung terkait permasalahan diatas tidak di masukan agar mudah menarik kesimpulan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar category, *flowchart* dan sejenis melalui penyajian data tersebut, maka terorganisasikan tersusun dalam polah hubungan sehingga semakin mudah dipahami.

Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti hanya dibatasi pada pokok permasalahan yaitu : Dampak bantuan dana BOS terhadap keluarga Miskin di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende dan faktor penghambat dan pendukung dalam operasionalisasi dan BOS di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman setelah mereduksi data, dan penyajian data maka tindakan selanjutnya ialah Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ialah mengambil intisari dan penyajian data merupakan hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian.

Kesimpulan dari data-data yang telah di kumpul untuk menjadi pokok pembahasan itu Dampak bantuan dana BOS terhadap keluarga miskin di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende dan faktor penghambat pendukung dalam operasionalisasi dana BOS di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PROFIL SEKOLAH

1. Sekolah Dasar MIS Nur Alansar wolonawa Dan SD wolowaru 3

SD Mis Nur Alansar Dan SD Wolowaru 3 terletak di Jl. Smulai beroperasi pada tahun 1987. Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 2000 m² terdiri 1 lantai dan 14 ruangan dan terakreditasi baik. Sekolah ini memiliki 1 (satu) orang kepala sekolah, 9 (sembilan) orang guru PNS, dan 5 (lima) orang guru tidak tetap. Jumlah siswa pada tahun 2010/2011 sebanyak 396 siswa dan 2016/2017 sebanyak 403 siswa dengan keseluruhan 12 rombongan belajar. Siswa terdiri dari berbagai macam kalangan dengan status ekonomi yang juga beragam. Dilihat dari tingkat kesejahteraan orang tua siswa terdapat 50% orang tua siswa yang dikategorikan pra sejahtera, sisanya adalah menengah 35% dan kategori mampu 15%.

2. Visi Misi dan Tujuan SD MIS Nur Alansyar wolonawa dan SD Wolowaru 3

Adapun visi, misi dan tujuan dari SD MIS Nur Alansyar wolonawa dan SD Wolowaru 3 adalah sebagai berikut:

1. Visi

- 1) Menjadi SD yang berprestasi terampil dalam kehidupan, beriman, dan bertakwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sederhana.

2. Misi

- 1) Menyusun kurikulum yang adaptif;
- 2) Mengoptimalkan proses pembelajaran yang PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan);
- 3) menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan;
- 4) membudayakan pendidikan karakter bangsa dalam perilaku kehidupan sehari-hari;
- 5) mengupayakan manajemen sekolah yang kondusif;
- 6) mengupayakan pembiayaan pendidikan yang memadai;
- 7) melaksanakan penilaian secara obyektif dan memantau prestasi siswa secara berkelanjutan.

B. Tujuan Sekolah

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, berkarakter, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Merujuk pada tujuan pendidikan dasar tersebut, maka tujuan Sekolah Dasar Inpres Tamajene adalah sebagai berikut :

- a. Mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan serta pendidikan karakter bangsa;
- b. Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat Kabupaten
- c. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk

melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi;

d. Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat sekitar;

e. Menjadi sekolah favorit yang diminati masyarakat.

C. Prestasi Lulusan

a. Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu 100% lulus,

b. Prestasi lomba-lomba akademik sekolah (rata-rata belum mencapai prestasi),

c. Prestasi non akademik sekolah yaitu dalam bidang olahraga dan keterampilan/seni, belum dapat dikatakan tinggi (rata-rata mencapai kejuaraan tingkat kecamatan).

D. Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Di SD Wolowaru 3-10 orang guru yang berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan hanya sebagian yang telah mengikuti penataran-penataran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, sisanya 5 orang berpendidikan belum S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang, semua guru belum memiliki prestasi baik di tingkat kotamadya maupun provinsi.

b. Kepala sekolah berpendidikan S1 dan tidak mampu mengoperasikan komputer.

c. Tenaga Kependidikan Tidak memiliki tenaga administrasi sarana dan prasarana, selama ini kepala sekolah dengan bendahara yang memiliki

peranan sebagai tenaga administrasi sarana prasarana dalam mengelola pemanfaatan dana program.

E. Pengembangan Kurikulum

Kurikulum SD Inpres wolowaru 3 dan SD mis Nur Alnsyar wolonawa telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan, yaitu dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

- a. 100% guru telah menyusun program tahunan, program semester (promes) dan silabus mata pelajaran, untuk kalender pendidikan sekolah hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 100% guru telah menyusun RPP,
- c. Program remedial dan pengayaan. Guru telah melaksanakan remedial dan melakukan pengayaan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau Standar Nasional Pendidikan.

F. Sarana dan Prasarana

- a. Sekolah ini memiliki 12 ruangan kelas, karena ruang kelas yang tersedia tidak mampu menampung seluruh siswa, maka proses belajar mengajar terbagi dalam 2 shife serta sarana dan prasarana (fasilitas) lainnya belum lengkap dan memadai, belum dapat dikatakan memenuhi Standar Nasional Pendidikan,
- b. Bahan dan sumber belajar Buku, beragam macamnya, buku cerita, buku pengetahuan, buku pelajaran, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain-lain dalam kondisi sebahagian tidak terawat. Perbandingan jumlah buku

pelajaran dan jumlah siswa belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

- c. Materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dengan menggunakan fasilitas yang cukup modern seperti papan tulis (*white & black board*), alat bantuan peraga IPA, serta LCD dalam jumlah yang belum proporsional dengan jumlah siswa.
- d. Fasilitas ruangan yang disediakan untuk menunjang pembelajaran para siswa di sekolah ini antara lain tersedianya ruang perpustakaan, koperasi, dan mushola serta fasilitas lainnya adalah lapangan untuk berolahraga dan beberapa sarana penunjang kebersihan.
- e. Lingkungan sekolah yang tertib dan aman, infrastruktur bangunan belum diperbaiki (dalam tahap renovasi). Sekolah ini juga belum memiliki jaringan komunikasi akademik (website).

G. Pengembangan Nilai

- a. Memenuhi standar penilaian sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan (KKM (kriteria ketuntasan minimal) belum memenuhi SNP),
- b. Sistem penilaian tersusun dengan baik,
- c. Belum memiliki bank soal sebagai database sistem penilaian yang baik,
- d. Memiliki dokumen penilaian yang lengkap, komprehensif dan rapi

H. Program Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan pemerintah pusat kepada seluruh SD Indonesia, baik negeri maupun swasta. Bantuan ini diberikan kepada

siswa melalui sekolah yang langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, yang mengupayakan agar anggaran pendidikan segera mencapai 20 % dari total APBN/APBD. BOS pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

I. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.

3. Meringankan beban bata operasi sekolah bagi siswa di sekolahswasta.

J. Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah Sekolah penerima BOS adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka SD baik Negeri maupun Swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari Program BOS ini. Alokasi untuk SD per siswa per tahun dari BOS Tahun Anggaran 2011 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi untuk SD/SDLB di kota adalah sebesar Rp. 400.000 persiswa/tahun;
- b. Alokasi untuk SD/SDLB di kabupaten adalah sebesar Rp. 397.000 per siswa/tahun;

K. Waktu Penyaluran Dana

Waktu Penyaluran Dana BOS Tahun anggaran 2011, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2011, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 dan semester 1 tahun pelajaran 2011/2012. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

L. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut. Dalam peraturan tersebut biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:
 - a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;
 - b. Biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
 - ❖ Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
 - ❖ Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll;
 - c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Dalam penggunaan dana BOS, biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, sehingga penggunaannya dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional nonpersonil bagi sekolah sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2015.

M. Sekolah Penerima BOS

1. Semua sekolah SD negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS.
3. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
4. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.
6. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, kecuali terhadap siswa miskin.

N. Program BOS dan Wajib Belajar 6 Tahun yang Bermutu

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu

pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;

2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah;
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara;
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangkusekolah;
5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak ada intimidasi bagi yang tidak menyumbang.

O. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 6 tahun, tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah diatur dalam PP No 48 Tahun 2008 yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya

Standar Nasional Pendidikan;

2. Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional, selain dari Pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah;
3. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

P. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua Peserta Didik

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:

1. Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya;
2. Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional.

Q. Prosedur Pelaksanaan

Mulai tahun 2011, dana BOS yang berasal dari Pemerintah/APBN disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Transfer setiap triwulan (tiga bulan) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011. Dana BOS untuk Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan dalam mekanisme APBD. Untuk sekolah swasta dananya disalurkan melalui Pejabat Pengelola Keluar Daerah (PPKD)

selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), sedangkan untuk sekolah milik pemerintah daerah (negeri) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan.

Penetapan alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan koordinasi Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data jumlah siswa tiap sekolah kepada Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan;
3. Alokasi dana BOS per sekolah negeri ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan alokasi per sekolah swasta ditetapkan oleh pemerintah daerah (melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) atas usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan data jumlah siswa;
4. Alokasi dana BOS per sekolah untuk periode Januari-Juni 2011 didasarkan jumlah siswa tahun pelajaran 2010-2011, sedangkan periode Juli-Desember 2011 didasarkan pada data tahun pelajaran 2010-2011. Alokasi Dana BOS untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan penggunaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Rincian alokasi sekolah negeri tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS

Tahun Anggaran 2016

R. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah dan Madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/ dewan guru dengan Komite Sekolah/ Madrasah, yang harus didaftar sebaga salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (Blook Grant, BOM, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb).Penggunaan Dana BOS menurut Juknis 2011dapat digunakan untuk 13 jenis komponen yang diperbolehkan didanai oleh BOS, yaitu :

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak. Buku teks yang boleh dibeli adalah buku teks yang telah dinilai kelayakannya olehPemerintah.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan SiswaBaru.Digunakan untuk biaya pendaftaran, penggandaan formulir,administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut termasuk di dalamnya pengeluaran untuk alat tulis, fotocopy, honor/uang lembur, dan konsumsi panitia pendaftaran siswa baru dan pendaftaran ulang siswa lama.
3. Membiayai kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pematapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja; pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya. Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut seperti

pengeluaran alat tulis, bahan dan penggandaan materi termasuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, membeli alat olah raga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.

4. Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. Dapat digunakan untuk membayar honor pengawas ulangan/ujian, penulis soal ujian, pengoreksi hasil ujian, panitia ujian, honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa, membeli bahan dan penggandaan soal, dll yang relevan dengan kegiatan tersebut.
5. Membeli bahan-bahan habis pakai. Digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris. Dana BOS dapat juga digunakan untuk membayar langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor. Untuk pembelian bahan-bahan habis pakai dalam mendukung proses belajar mengajar. Membayar langganan daya dan jasa. Untuk membayar langganan listrik, air, telepon dan internet yang ada di sekolah. Bila terdapat jaringan telepon dan listrik di sekitar sekolah dan sekolah belum berlangganan daya dan jasa tersebut, diperkenankan untuk memasang sambungan telepon listrik ke sekolah. Tidak diperkenankan untuk pembelian handphone dan membayar pulsa handphone. Jika tidak ada jaringan listrik dan dirasakan

diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar, maka diperkenankan untuk membeligenset.

6. Membayar biaya perawatan sekolah Digunakan untuk keperluan biaya perawatan ringan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. Perawatan ringan dilakukan dengan sekolah. Pembayaran honor pekerja berdasarkan upah harian sesuai kehadiran dibuktikan dengan daftar hadir. Pengadaan bahan perawatan ringan.
7. Membayar honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS. Bagi guru PNS di sekolah negeri yang mengajar di sekolah swasta di luar kewajiban jam mengajar di sekolah negeri, diperlakukan sebagai tenaga pendidik honorer oleh sekolah swasta tersebut. Guru PNS yang ditugaskan oleh pemerintah di sekolah swasta, diperlakukan sebagaimana PNS di sekolah negeri. bahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Serta honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
8. Pengembangan Profesi Guru Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/blok grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sarna tidak diperkenankan

menggunakan dana BOS untuk peruntukkan yang sarana. Pengeluaran untuk kegiatan tersebut seperti honorarium narasumber, penulis naskah materi paparan, pengadaan alat tulis, bahan, penggandaan materi, transport, dan konsumsi dapat menggunakan dana BOS.

9. Memberi bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan kesekolah dipergunakan untuk meringankan biaya transport dari dan ke sekolah bagi siswa miskin. Bantuan diberikan hanya kepada siswa yang karena biaya transportasi sehingga terancam tidak masuk sekolah. Komponen ini juga dapat berbentuk pembelian alat transportasi bagi siswa yang tidak mahal, misalnya sepeda, perahu penyeberangan dll. Alat ini menjadi inventaris sekolah.
10. Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS, seperti: Alat Tulis Kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank IPT Pos Indonesia (Persero).
11. Pembelian komputer (desktop/work station) untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 unit dan pembelian 1 unit printer dalam satu anggaran.
12. Bila seluruh komponen 1 s.d. 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebel sekolah. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak

diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sarana.

S. Larangan Penggunaan Dana BOS

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ruangan baru.
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah,

misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.

- 13 Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional

T. Landasan Hukum Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Program BOS

Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2011 antara lain :

1. UU No. 10/2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011
2. PERMENKEU No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Penyesuaian untuk BOS bagi Kab./Kota 2011
3. PERMENDIKNAS No. 37/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011
4. SEB Mendagri-Mendiknas No.900/5106/SJ/2010 dan No.02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun 2011

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dideskripsikan tentang analisis hasil penelitian terhadap evaluasi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Analisis ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta dan temuan dilapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi dan wawancara dengan informan-informan terpilih yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap kondisi sekolah penerima dana BOS dengan menghubungkan teori yang digunakan dalam evaluasi pemanfaatan dana bos terhadap kegiatan pembelajaran.

A. DAMPAK

I. Hasil Penelitian

Sebagaimana sesuai dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui mengapa pemanfaatan dana program BOS di SD belum efektif, maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang terkait seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, serta orang tua siswa, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) berjalan efektif. Beberapa keterangan yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan informan setidaknya dapat menggambarkan bagaimana pemanfaatan dana dalam kaitannya terhadap pembelajaran di SD MIS Nur Alansar Wolonawa dan SD wolowaru 3 Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teori evaluasi yang dikembangkan oleh Bruce W Truckman. Adapun pemanfaatan dana BOS di SD MIS Nur Al ansyar dan SD Wolowaru 3 sebagai berikut :

II. Sumber Daya Manusia

Pertama, dari segi pencapaian masukan berkaitan dengan sumber daya manusia, walaupun tidak ada persyaratan khusus berkaitan dengan petugas yang menangani program BOS, tetapi dalam mengelola dana bantuan operasional ekolah (BOS) beberapa faktor kualifikasi seperti latar belakang pendidikan, pengalaman dan kompetensi perlu diperhatikan. Petikan wawancara dengan Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd Kepala Sekolah SD Wolowaru 3 dan Ibu Martina Sapan orang tua siswa SD Wolowaru 3 mengungkapkan hal tersebut:

“saya cukup lama menjadi kepala sekolah disini sudah 7 (tujuh) tahun, dan pertama kalinya dana bos dikucurkan di sekolah ini sejak tahun 2005, saya merasakan manfaat dana BOS ini sangat bagus terhadap siswa dan memberikan perubahan signifikan sebagai penunjang terselenggaranya dana BOS”. (hasil wawancara tanggal 16 Maret 2017)

Bendahara sekolah yang mengelola dana BOS cukup kompeten dalam dengan bidangnya dan sudah berpengalaman dalam mengelola biaya pendidikan di sekolah selama 6 tahun”. (hasil wawancara tanggal 17 Maret 2017).

Informasi dan keterangan yang didapat dari orang tua siswa SD Mis Nuralansyar Wolonawa adalah sebagai berikut :

“yang saya ketahui bendahara sekolah adalah orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan manajemen dana BOS di sekolah ini, karena yang saya ketahui beliau berpengalaman sebagai bendahara sekolah apalagi beliau sebagai guru agama.” (hasil wawancara tanggal 20 Maret 2017)

Selain itu, mengenai kompetensi guru, setiap sekolah melakukan pengembangan bagi setiap guru mata pelajaran dan membina guru sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan dana BOS dalam pengembangan kompetensi guru dilakukan sekolah

dengan berbagai macam cara, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd, Kepala Sekolah SD Mis Nur Alansyar Wolonawa.

“untuk pengembangan guru, kami pihak sekolah sedapat mungkin memanfaatkan dana BOS, misalnya mengikutsertakan guru-guru pada diklat, workshop, KKG, serta memfasilitasi (transportasi) kebutuhan guru seperti ke tempat pelatihan.” (hasil wawancara 23 Maret 2017).

III. Dana

Masalah dana BOS patut diamati, apakah dalam penyalurannya telah tepat waktu, prosedur penyaluran, sampai persyaratannya. Kepala sekolah SD Mis Nuralansyar Wolonawa Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd sebagai penanggung jawab memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

“kalau untuk masalah penyaluran dana pada tahun 2017 masih mengalami keterlambatan, tahun lalu bulan november baru cair, tetapi tahun 2017 ini,masuknya dana di awal Januari serta prosedur saya rasa tidak masalah, baik dari daftar usul alokasi anggaran dsb.. kami sudah merampungkannya untuk di serahkan ke Dinas Pendidikan Kota kabupaten Ende untuk mendapatkan dana. Sekarang dalam penyaluran dana bos kami terhubung langsung dengan dinas pendidikan kota, untuk persyaratan tidak ada yang dipersulit, hanya saja masalah pelaporan dana BOS (target penyelesaiannya) ditentukan oleh dinas kota, sehingga kami bekerja secara ekstra dalam penyusunan laporan.” Selain itu, Bendahara sekolah SD Mis Nuralansyar Wolonawa dan SD wolowaru 3 Dra Sumarni juga memaparkan bahwa :

“mekanisme penyaluran dana BOS masuk melalui rekening sekolah per triwulan (3 bulan), dimana sistem dan prosedurnya, terlebih dahulu kami harus membuat surat perjanjian dan surat pernyataan, kemudian membuat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), membuat daftar usul alokasi anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), dan

setelah dana cair/keluar maka pihak sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban BOS per triwulan ke kantor Dinas Pendidikan Kota kabupaten Ende.

Banyak pihak yang menilai bahwa masalah penyaluran yang mengalami keterlambatan penerimaan dana di rekening sekolah. Keterlambatan ini dapat menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif. Dari segi transparansi, penulis melihat adanya transparansi dana di SD Inpres Wolowaru 3 dan SD Mis Nur Alnsyar Wolonawa karena adanya laporan pemanfaatan dana bos per triwulan tetapi khusus pada papan informasi penggunaan dana BOS, data pengelolaan dananya jarang diperbaharui, sehingga beberapa wali murid yang ingin melihat perkembangan penggunaan dana bos tidak mendapatkan informasi yang diinginkan.

1. Sarana Prasarana

Masalah sarana prasarana pendidikan pada dasarnya cukup kompleks, namun demikian dapat ditelusuri dari berbagai sisi, yaitu dari segi jenis, proses, dan pemanfaatannya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program telah memadai, seperti yang dituturkan oleh Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd, Kepala Sekolah SD Mis Nur Alansyar wolonawa Dan SD wolowaru 3 di kabupaten ende

“untuk kelengkapan program kami disini memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti komputer, LCD, ruang guru, yang dapat digunakan. Selain itu permasalahan yang kami hadapi masih kurangnya guru SD di sekolah ini.” (hasil wawancara tanggal 24 Maret 2017) Ibu Dra Sumarni, selaku bendahara memaparkan bahwa : masalah sarana dan prasarana dalam pembelajaran siswa sudah cukup memadai, masih banyak fasilitas yang kurang, terlebih lagi masalah infrastruktur bangunan yang digunakan siswa masih dalam tahap pengajuan ke Pemkot agar bangunan yang lama

mendapat biaya renovasi dari pemerintah. Kami terus mengusahakan untuk melengkapinya, dan masalah masih dikenakan atau tidaknya pembiayaan pendidikan, kami pihak sekolah tidak memungut biaya dari orang tuasiswa”.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan di sekolah tersebut menyatakan bahwa Jumlah penggunaan buku belum sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada setiap semester baru (penerimaan siswa baru), karena sulit untuk mengkasifikasinya, tetapi sekolah terus mengupayakan kekurangan tersebut karena banyak anggaran lain yang dikeluarkan oleh sekolah”.

Selain itu, mengenai sarana dan prasarana yang mendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terlihat sekolah sedapat mungkin memanfaatkan untuk perawatan sarana dan prasarana yang telah ada, pembelian buku, dan sarana prasarana sekolah lainnya. Berikut petikan wawancara dengan salah satu orangtua siswa SD Mis Nuralansyar Wolonawa Dan SD Wolowaru 3 berkaitan dengan pemanfaatan BOS bagi sarana prasarana sekolah.

“sebenarnya BOS membantu orang tua, meringankan biaya, tapi masih ada kekurangannya, mengenai soal buku, saya dapat laporan dari anak saya, masih ada yang tidak mendapatkan buku”. (hasil wawancara 16 Maret2012) Ibu Hj. Sitti Rabina, Kepala Sekolah SD MIS Nuralsanyar wolonaewa Dan SD wolowaru 3 menyampaikan pendapatnya. “BOS sangat membantu pelaksanaan kegiatan belajar siswa, pengeluaran sekolah yang berasal dari dana BOS untuk guru honorer saja mengambil 20% dari dana BOS, belum lagi dilakukannya perawatan sekolah dsb, apalagi sekolah menyediakan buku untuk siswa. Selebihnya fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar sudah efektif dan memadai, dari peralatan penunjangnya (fasilitas di sekolah ini)”.

IV. Pencapaian Proses (*Process*)

Dari pencapaian proses program BOS, selama 6 tahun berjalan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Untuk pemanfaatan dana BOS, pihak sekolah mengalokasikannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam juklak/juknis. Penuturan Ibu Hj. Sitti Rabinah, S.Pd, Kepala Sekolah SD Mis Nuralansyar Wolonawa berikut menjelaskan bagaimana deskripsi alokasi dana BOS yang digunakan oleh sekolah.

“karena saya sebagai penanggung jawab di sekolah, penggunaan dana yang saya lakukan telah sesuai dengan juklak/juknis yang diterbitkan oleh pemerintah dimana pada awal periode program BOS, sekolah menggunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah dan membayar gaji honorer, hingga pada akhir program proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer/Tim BOS”. (hasil wawancara tanggal 23 Maret 2017)

Secara garis besar, berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS, penulis melihat sekolah menggunakan dana BOS untuk keperluan seperti

1. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah
2. Biaya tambahan kegiatan operasional sekolah, seperti honorarium guru honorer
3. Perawatan sekolah. Seluruh penggunaan tersebut tidak melanggar ketentuan juklak/juknis program. SD Inpres yang diteliti memberikan contoh anggaran yang didukung dana BOS sebagai berikut:

Tabel 3.

Anggaran Pemanfaatan Dana BOS Tri IV (Okt-Des) 2017

No	Keterangan	Nilai
1	Belanja Pegawai	Rp 8.060.000,00
2	Pembelian Buku	Rp 8.150.000,00
3	Pengadaan ATK	Rp 4.745.000,00
4	Langganan Listrik	Rp 395.000,00

5	Langganan Air	Rp 197.500,00
6	Langganan Telepon	Rp -
7	Perawatan Sekolah	Rp 2.765.000,00
8	Fotocopy	Rp 3.705.000,00
9	Biaya Konsumsi	Rp 6.000.000,00
10	Pembelian Barang	Rp 6.282.500,00
	Jumlah	Rp 40.300.000,00

Sumber : Dana BOS SD Inpres Wolowaru 3 Pencapaian Hasil (Output)

V. Mutu Pendidikan

Dari segi pencapaian hasil, pemanfaatan dana BOS yang mengacu pada mutu pendidikan sangat dirasakan oleh orang tua siswa. Secara umum mutu diartikan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dapat dipandang dari segi proses pendidikan dan hasil pendidikan. (Depdiknas, 2007) Ditinjau dari sisi proses, pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari segi *input*, seperti fasilitas/bahan mengajar, kemampuan guru mengajar, sarana prasarana sekolah dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Untuk mencapai hasil pendidikan tersebut, sekolah dituntut mampu mensinkronkan berbagai input/komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa, dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ujian nasional). Demikian pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di bidang olah raga, seni atau keterampilan lainnya.

Angka kelulusan di SD Inpres Wolowaru 3 dan Mis Nur Alnsyar Wolonawa relatif baik, terhitung sejak pelaksanaan program BOS, seluruh siswa dinyatakan lulus (100%) dan seluruhnya melanjutkan ke jenjang SMP. Kemampuan siswa terhitung masih dalam kategori cukup, dalam arti tidak ada nilai ujian siswa yang terlalu menonjol.

Tabel 4. Nilai Hasil Ujian Nasional

Tahun Pembelajaran	Rata-rata UAN				
	Bahasa Indonesia	MTK	IPA	Jumlah	Rata-rata tiga mata pelajaran
2010/2011	6.24	4.11	4.87	15.22	5.07
2011/2012	6.02	6.39	7.00	19.41	6.47
2012/2013	6.51	6.00	6.55	19.06	6.35

Sumber : profil SD Inpres Mis Nur Alnsyar Wolonawa

Penuturan dari Hj. Sitti Rabinah, Kepala Sekolah SD MIS Nur Alnsyar Wolonawa menyatakan bahwa :

dari tahun ke tahun nilai ujian di SD ini meningkat selama adanya dana BOS. paling signifikan pada tahun ajaran 2008/2009, 2009/2010 dan 2010/2011, kami terus mengupayakan peningkatan mutu di sekolah

Hal lain yang sangat penting dalam pencapaian hasil adalah soal keringanan biaya sekolah, apakah dengan adanya program dana BOS, orang tua siswa masih dibebankan pungutan/iuran lain. Orang tua siswa SD Inpres Tamajene memberi keterangan sebagai berikut :

“kalau untuk biaya sekolah terutama iuran, kami memang tidak dipungut, tetapi terkadang untuk biaya tidak terduga pihak sekolah masih memungut dari kami”.

“dengan adanya dana bos pungutan di sekolah hampir tidak ada, paling hanya kalau anak-anak mengadakan perpindahan sekolah, biasanya dipungut biaya, itupun tidak banyak dan saya berharap bahwa yang mendapatkan dana bos tersebut harus benar-benar orang yang tidak mampu/layak mendapat dana bos”.

VI. Faktor-Faktor Pelaksanaan Bos

Berbagai kendala yang ditemui informan dalam program BOS ini adalah sebagai berikut :

“Masalah hambatan yang dihadapi oleh sekolah lebih ke pencairan dana masih terlambat terkadang di bulan kedua atau ketiga, tahun lalu saja (2011) cair di bulan November, salah satunya sekolah lambat membayar gaji tenaga honorer. Selain itu jumlahnya masih minim untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang banyak”.

“Laporan pertanggung jawaban dana BOS sudah ditentukan waktunya oleh dinas pendidikan dan kami selaku kepala sekolah dan bendahara bekerja keras untuk menyelesaikan laporan tersebut”.

“Sosialisasi kepada masyarakat diabaikan, apalagi kami sempat berpikir untuk mengadakan sosialisasi BOS, tapi kembali lagi keterbatasan dana yang dimiliki sekolah”.

Banyak pihak yang menilai bahwa masalah penyaluran yang mengalami keterlambatan penerimaan dana di rekening sekolah. Keterlambatan ini dalam menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif. Selain itu, ada beberapa wali murid yang tidak melihat papan informasi transparansi penggunaan dana dan juga ada sebahagian wali murid tidak pernah menanyakan perihal pemanfaatannya dana BOS pada sekolah, karena yang menjadi masalah yaitu sosialisasi tidak dilakukan oleh pihak sekolah sedangkandalam pelaporan dan monitoring evaluasi, permasalahan yang dikemukakan adalah kesulitan sekolah dalam menyusun laporan keuangan.

VII. Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa untuk mengetahui mengapa pemanfaatan dana BOS di SD MIS Nur Alnsar wolonawa Dan SD Wolowaru 3 belum efektif dengan menggunakan teori evaluasi program yang diungkapkan oleh

BrucW Truckman yang membagi analisa dengan menggunakan metode terkait masukan (*input*) program, proses (*process*) program sampai hasil (*output*) yang dicapai oleh program itu sendiri.

VIII. Pencapaian Masukan (*Input*)

Masukan program dana BOS dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program BOS, anggaran dana, dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan Sumber Daya Manusia(SDM)

Dalam proses pemanfaatan dana BOS faktor lain yang tak kalah pentingnya yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Masukan program meliputi kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM yang terlibat di dalamnya. Tanpa sumber-sumber daya tersebut proses pelaksanaan tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini mudah dimengerti karena proses pelaksanaan program sudah tentu menuntut tersedianya SDM yang cukup baik dalam jumlah maupun kualifikasinya. Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai akan sangat menentukan evaluasi pemanfaatan dana. Oleh karena itu, pengelola program pada komponen SDM yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan SDM, pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan program BOS, memahami tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program sesuai juklak, dan mampu mensosialisasikan kembali kepada masyarakat/orang tua siswa. Dalam menjalankan program diperlukannya sikap profesionalisme dan kualitas yang cukup baik dari SDM yang diberikan kewenangan, mereka dapat memahami dengan baik, peraturan-peraturan maupun juklak/juknis sebagai dasar pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan persyaratan sebagai langkah awal, pengelolaan dana sampai laporan

pertanggung jawaban pemanfaatan dana BOS. Selain itu, mengenai kompetensi guru dari segi kegiatan belajar mengajar, banyak indikator yang dapat dilihat apakah pemanfaatan dana BOS efektif atau tidak. Pertama, faktor tenaga pendidik. Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal.

Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Guru mempunyai peranan strategis dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak didik dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Seiring dengan UU No 20/2003 dan ketentuan pasal 4 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa “guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu diantaranya adalah kompetensi. Salah satu peruntukan resmi program dana BOS adalah untuk pembayaran gaji honorer. Program dana BOS efektif jika menyentuh langsung guru honorer. Hal yang ingin dicapai adalah mampu memecahkan berbagai masalah dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Faktor lain guna memperbaiki pendidikan adalah dengan mendorong para guru agar dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran, juga mendorong peran orang tua untuk ikut membimbing dan memotivasi belajar anak di rumah. Hal yang lebih penting sebagai jangka panjang perlunya pemerintah mendorong untuk meningkatkan penghasilan para orang tua dengan membuka berbagai hal lapangan pekerjaan untuk kesempatan. Selain itu, peningkatan penerimaan guru, baik melalui peningkatan honor guru honorer maupun dari penerimaan tambahan bagi guru tetap dan tidak tetap berkaitan dengan peningkatan kegiatan belajar mengajar.

Peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru seperti KKG/MGMP/pelatihan/workshop. Namun, perlu dicatat bahwa

dampak kegiatan tersebut akan maksimal bila kualitas kegiatan tersebut dapat dijaga. Berkaitan dengan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia di sekolah pada umumnya bersumber dari pembiayaan dana rutin dan dana BOS maupun dana untuk penyelenggaraan pelatihan. Terhadap pelaksanaan pembinaan guru di tingkat sekolah pada umumnya memperoleh dukungan dari dana BOS. Fenomena ini dianggap telah memberikan iklim yang baik terhadap peningkatan guru berbasis sekolah dengan pemanfaatan dana BOS. Peningkatan mutu guru juga selalu dibarengi dengan monitoring guru oleh kepala sekolah secara berkala. Terkait dengan pendidikan dan pelatihan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai penanggung jawab dan pelaksana program, kepala sekolah, bendahara, dan guru mendapatkan pelatihan dari pemerintah kota dan pengalaman mereka didukung oleh pendidikan yang memadai dan kepala sekolah telah menekuni bidangnya selama 7 tahun serta sebahagian guru berpendidikan sarjana. Dengan demikian komponen sumber daya manusia (SDM) pelaksana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD Inpres Tamajene telah memenuhi untuk kualifikasi pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.

IX. Pencapaian Proses

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Teknis (Juknis) BOS Dalam pencapaian proses merujuk dari hasil teori evaluasi program Bruce W Truckman, dilihat kesesuaian antara pelaksanaan program BOS dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam juklak/juknis. Dalam rangka memberikan panduan terhadap pelaksanaan program bantuan operasional sekolah diatur lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan, larangan penggunaan, mekanisme penyaluran sampai monitoring dan evaluasinya. Pengelola program tingkat pusat telah menerbitkan buku petunjuk pelaksanaan/penggunaan program. Diharapkan dengan buku petunjuk pelaksanaan tersebut seluruh pengelola program dari mulai tingkat pusat sampai tingkat sekolah baik di bawah lingkup

Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama, maka dalam melaksanakan program sesuai juklak/juknis dituntut pemahaman yang baik dari SDM yang terlibat. Buku petunjuk pelaksanaan tersebut didistribusikan oleh Tim PKPS Pusat melalui jasa PT. POS Indonesia ke seluruh pelaksana program di semua tingkatan termasuk ke pelaksana program di sekolah. Dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran dana BOS, dana BOS harus merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) di samping dana yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan dana BOS di SD MIS Nuralansar wolonawa Dan SD wolowaru 3 didasarkan atas kesepakatan antara sekolah dengan komite sekolah. Untuk jenjang SD dan sederajat telah disepakati sebesar Rp 400.000 per tahun per siswa. Dana BOS ini nantinya digunakan untuk keperluan biaya telepon, air, dan listrik serta evaluasi penerimaan siswa baru, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah. Mengenai pengelolaan dana BOS di SD Inpres Tamajene menurut kepala sekolah pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua kepala sekolah telah melakukan pengelolaan dana BOS menggunakan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah, dan semua kepala sekolah juga memahami isi buku tersebut. Mengenai besar penggunaan dana BOS, informan menyatakan peruntukan dana BOS adalah untuk keperluan administrasi sekolah, membayar guru honor, perawatan dan perbaikan serta melengkapi sarana sekolah. Hal ini telah sesuai dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan. Adapun jenis sarana belajar yang paling banyak diperhatikan adalah media pembelajaran yang mencapai dan buku pelajaran.

X. Pencapaian Hasil (*Output*)

Pencapaian hasil dalam pemanfaatan dana BOS dapat diindikasikan dari *pertama*, apakah dana BOS yang disalurkan dapat meringankan beban orang tua siswa. *Kedua*, berkaitan dengan mutu pendidikan dasar 9 tahun, dapat diamati pencapaian sekolah

dalam prestasi siswa, baik dalam bidang akademis dan nonakademis.

XI. Prestasi Siswa

Kemampuan/potensi siswa merupakan dasar utama bagi pencapaian prestasi. Kemampuan/potensi yang dimiliki siswa apabila dapat dikembangkan ke arah yang positif akan berdampak pada prestasi sekolah juga. Sedangkan dalam pengaruh pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah penelitian mempunyai dampak/pengaruh yang positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Sebagai dampak dari pengelolaan sekolah dengan dukungan dana BOS kepala sekolah menyatakan prestasi sekolah meningkat.

Hal ini merupakan hasil yang menggembirakan, karena penyelenggaraan sekolah dengan bantuan dana BOS telah dapat dirasakan oleh masyarakat dan peserta didik. Hasil positif dari kepala sekolah yang lain adalah angka putus sekolah yang diakibatkan oleh biaya pendidikan telah mencapai angka nol, atau dengan kata lain sudah tidak ada anak yang putus sekolah di lokasi penelitian.

XII. Keringanan Biaya Sekolah Bagi Orang Tua Siswa

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari orang tua siswa, bahwa dengan adanya bantuan dana BOS dapat meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung, terutama iuran. Walaupun terkadang masih ada iur dimintoleh pihak sekolah, tetapi frekuensinya minimal sekali. Pendidikan dasar merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia, sehingga mutu dan kualitasnya harus ditingkatkan karena pendidikan dasar menjadi dasar input ketika anak didik itu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan dana tersebut, tak ada alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar. Karena, para orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya pendidikan yang banyak pada setiap tahun ajaran baru untuk anak-

anaknya yang akan bersekolah.

Berdasarkan uraian di atas nampak kaitan yang erat antara penggunaan dana BOS dengan indikator mutu pendidikan. Sekolah yang mempunyai komitmen untuk memajukan pendidikan tingkat satuan sekolah diharapkan dapat memanfaatkan dana BOS untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi sarana pembelajaran yang dibutuhkan. Dengan demikian nampak kebermanfaatan dana BOS bagi peningkatan kualitas kegiatan dan mutu pendidikan di sekolah. Indikator terpenting lainnya adalah tidak terdapatnya angka putus sekolah yang diakibatkan oleh keberatan orang tua membayar iuran sekolah. Dampak lain yang diperoleh melalui wawancara adalah tingginya semangat belajar akibat dorongan semakin banyaknya kegiatan sekolah akibat dukungan dana BOS.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pemanfaatan dana BOS pada pembelajaran siswa, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah pemanfaatan dana BOS di SD Inpres Wolowaru 3 dan SD Mis Nur Alnsyar Wolonawa Kecamatan wolowaru kabupaten ende belum sepenuhnya efektif, karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SD Inpres Wolowaru 3 dan Mis Nur Alnsyar Wolonawa banyak yang belum tercapai sebagai berikut:

Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah yang ditangani oleh di SD Inpres Wolowaru 3 dan Mis Nur Alnsyar Wolonawa Kecamatan Wolowaru belum sepenuhnya efektif karena pertama aspek SDM, jumlah pegawai/staff yang sedikit khususnya untuk mengelola dana BOS serta minimnya pegawai/staff di lokasi penelitian. Kedua aspek dana, pencairan dana BOS dari pusat sampai ke rekening sekolah terkadang mengalami keterlambatan.

Ketiga aspek sarana dan prasarana, pada dasarnya mengalami peningkatan dengan pembelian sarana dan perawatan sarana yang telah ada, tetapi untuk pengadaan buku pelajaran berjalan belum efektif karena jumlah pengadaan buku yang masih kurang terhadap siswa. Aspek lainnya yaitu bentuk sosialisasi, pengawasan dan monitoring jarang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua murid sehingga pemahaman orang tua mengenai dana BOS sangat kurang. Banyak orang tua siswa yang beranggapan bahwa dana BOS adalah beasiswa pendidikan yang diberikan secara tunai serta masalah data di papan informasi jarang di update sehingga beberapa wali murid tidak mendapatkan informasi yang diinginkannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pemanfaatan

dana BOS terhadap pembelajaran siswa telah menunjukkan keadaan yang belum sepenuhnya efektif. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu :

1. Demi terwujudnya pemanfaatan dana BOS yang efektif SD MIS Nur Alansyar wolonawa Dan SD wolowaru 3 juga diharapkan dapat mengatur pola pembiayaan operasional pemanfaatan dana BOS yang lebih efisien disertai dengan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan menambah jumlah pegawai/staff khususnya yang menangani dana BOS perlu lebih ditingkatkan.
2. SD MIS Nur Alansyar wolonawa Dan SD Wolowaru 3 kecamatan wolowaru kabupaten Ende. seharusnya mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan dana BOS guna meningkatkan peran serta masyarakat khususnya orang tua/wali murid karena perhatian orang tua siswa menjadi menurun di sebabkan orang tua siswa sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar iuran setiap bulannya, untuk itu perlunya diadakan sosialisasi agar komunikasi orang tua dengan pihak sekolah dapat meningkat dan mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana dapat terwujud.
3. Dari hasil penelitian ini masih perlu ada kajian lanjutan yang lebih mendalam, hal ini mengingat penelitian yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan baik waktu maupun minimnya materi yang bersifat teori maupun data yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, maka dari penelitian ini perlu diusulkan tema penelitian lanjutan yang lebih fokus dan mendalam seperti pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di kecamatan wolowaru Kabupaten Ende.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Sritua. 1997. *Penelitian Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- B. Uno, Hamzah. 2008. *Model Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara
- Creswell. 1998. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bos Buku /dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu*. Jakarta: Depdiknas.
- Nasution, S. 2005. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara
- Purwadaminto, W.J.S. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soegiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&d*. Bandung Alfabeta
- Soekamto, Soejono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Tirtahardja, Umar. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Binatama Raya. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 2006.

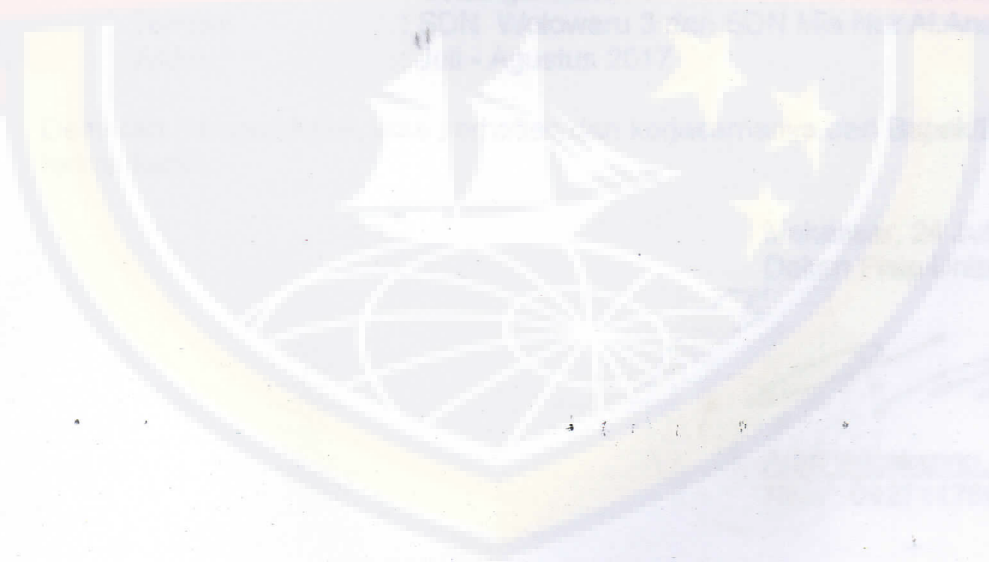


UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Jendral Sudharso Km. 4, Dk. 3 U. 1, Makassar Sulawesi Selatan 90241
Telp. 0411 452 901 - 452 750 Ext. 323, Faks. 0411 451 307
http://www.universitaspbosowa.ac.id, Email: fops@universitaspbosowa.ac.id

Nama : ...
Lampiran : ...



LAMPIRAN





UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 1, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>, Email: fisip@universitasbosowa.ac.id

Nomor : A.210 /FSP/Unibos/VII/2017
Lampiran : 1 (satu) Rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,

Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Ende

Di

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, maka kami mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu memberikan Data/Informasi dalam Penelitian Penyusunan Skripsi kepada mahasiswa kami tersebut dibawa ini :

Nama : HAMDAN MOH. LENGGO
Nim : 45 13 022 Q12
Program Studi : ILMU SOSIOLOGI
Judul Penelitian : dampak Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) Terhadap keluarga Miskin Di Kecamatan Wolowaru kabupaten Ende.
Tempat : SDN Wolowaru 3 dan SDN Mis Nur Al.Ansar Wolonawa
Waktu : Juli - Agustus 2017

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 24 Juli 2017
Dekan Fisip Unibos,

Arief Wicaksono, S.Ip, M.A.
Nidn 0927117602

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANGPOLLINMAS)

Jln. Durian No. (0381) - 21037 Ende

SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI
UNTUK MENGADAKAN PENELITIAN
Nomor : BKPPM.1474/IV/02/VIII/2017

- mbaca : Surat Dekan FISIPOL Universitas BOSOWA Makasar Nomor :
A.232/FSP/Unibos/IX/2018, tanggal 07 September 2018. Perihal: Permintaan
Izin Penelitian Penyusuna Skripsi
- ur : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1991 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : 1270/Sospol/D.IV/X/1980,
tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing, Tanggal 21 Oktober 1980;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
- perhatikan : Rencana Proposal Penelitian, yang diajukan oleh yang bersangkutan pada Bulan
Agustus 2017
- erangkan : Bahwa dapat diberikan ijin untuk mengadakan penelitian:
- | | |
|------------------------|---|
| Nama | : Hamdan Moh. Lenggo |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Prodi | : Sosiologi |
| Fakultas | : FISIPOL |
| Lembaga | : Universitas Bosowa |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Judul | : "Dampak Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS)
Terhadap Keluarga Miskin di Kecamatan Wolowaru
Kabupaten Ende" |
| Tempat Penelitian | : SDN Wolowaru 3 dan SDN Mis Nur Al-Ansar Wonlawa |
| Waktu/lama
Pengikut | : 2 (dua) TMT Surat ini dikeluarkan
: ----- |
| Penanggung Jawab | : Dekan FISIPOL Unibos Makasar |
| Sponsor | : ----- |
| Biaya | : Sendiri |

Pemegang rekomendasi berkewajiban menghormati/ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku, dan melaporkan hasil-hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende dengan ketentuan:

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kepada Unit Kerja Terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa setempat;
2. Selama melakukan penelitian tidak dibenarkan/ diijinkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti di atas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Ende
pada tanggal 15 Agustus 2017

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende
Sekretaris.

f. Ub. Kabid Hubungan Antar lembaga

ARNOLDUS NGEY, SE
PEMBINA

NIP. 19660830 199903 1 002

embusan :

1. Yth. Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Kantor PPTSP Kabupaten Ende di Ende;
3. Yth. Camat Ende Utara di Ende;
4. Yth. Dekan FISIPOL UNIBOS Makasar di Makasar.



PEMEKINTAH KABUPATEN ENDE
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANGPOLLINMAS)

Jln. Durian No. ■(0381) – 21037 Ende

KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : BKPPM.1474/IV/02/VIII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arnoldus Ngey, SE
Nip. : 19660830 199903 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina /IV a
Jabatan : Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hamdan Moh. Lenggo
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan / Prodi : Sosiologi
Fakultas : FISIPOL
Lembaga : Universitas BOSOWA Makasar
Lokasi : SDN Wolowaru 3 dan SDN Mis Nur Al. Ansar Wonlawa
Dasar Surat : Kepala Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende tanggal 14 Agustus 2017
Waktu / lama : Selama 2 (dua) minggu
Judul Penelitian : "Dampak Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Keluarga Miskin di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende"
Maksud : Selesai Melaksanakan Penelitian

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Ende
pada tanggal 15 Agustus 2017

an. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende,
Sekretaris,

Pub. Kabid Hubungan Antar Lembaga

Arnoldus Ngey, SE

Pembina

NIP. 19660830 199903 1 002

Tembusan ;

1. Yth. Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Yth. Dekan FISIPOL Universitas BOSOWA Makasar di Makasar.